



LAPORAN KINERJA (Lkj)

SEKRETARIAT DPRA

TAHUN 2022



SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jl. Tgk. H. Daud Beureueh Kec. Kuta Alam B. Aceh 23121

Telp. 0651-32138, Fax 0651-21638

Email: dpra@acehprov.go.id

Website: www.dpra.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wata'ala serta dengan tidak lupa pula Shalawat dan Shalam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Shalallahu'alaihi wassalam, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2022 telah dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Sekretariat DPR Aceh Tahun 2022 ini berisi informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPR Aceh yang telah ditetapkan tahun 2022, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada DPR Aceh.

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja Sekretariat DPR Aceh yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari lembaga pengawasan dan lembaga penilai akuntabilitas serta pihak-pihak yang berkompeten sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini di masa yang akan datang. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPR Aceh Tahun 2022 ini disampaikan semoga dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan prima dan sebagai *supporting system* kepada DPRA.

Banda Aceh, 31 Januari 2023

 **SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,** 



SUHAIMI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640622 199403 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian sasaran strategis “**Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA**”, Diukur dengan indikator:

- 1) Persentase Qanun yang diselesaikan, dengan formulasi penghitungan jumlah realisasi pembahasan rancangan qanun dibandingkan dengan target pembahasan. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.
- 2) Persentase kegiatan DPRA yang terfasilitasi, dengan formulasi perhitungan jumlah kegiatan DPRA yang terlaksana dibandingkan jumlah kegiatan DPRA yang direncanakan. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja dan faktor penghambat keberhasilan Sekretariat DPRA.

a. Faktor Pendukung:

1. Adanya Nomenklatur Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dapat lebih maksimal mengakomodir kegiatan DPRA;
2. Terlaksananya SOTK baru Sekretariat DPRA yang lebih mengakomodir fungsi-fungsi DPRA (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018);
3. Komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta operasional dan administrasi Sekretariat DPRA; dan
4. Kerjasama dan Komunikasi serta Koordinasi Intensif antara stakeholder baik internal (Bagian/Sub. Bagian) maupun eksternal (mitra sukses).

- b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut:

“Fungsi Sekretariat DPRA hanya sebagai unsur pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRA, sehingga pencapaian kinerja sangat tergantung pada kinerja DPRA”

Alokasi anggaran murni Sekretariat DPRA Tahun 2022 sebesar **Rp. 231.945.600.000,-**, dan terjadi pengurangan anggaran pada perubahan menjadi **Rp. 225.812.932.571,-**. Secara umum, alokasi anggaran tersebut sudah terealisasi dengan baik yaitu sebesar **Rp. 203.919.157.367,-** (90,30%) dengan sisa anggaran **Rp. 21.893.775.204,-** (9,7%).

DAFTAR ISI

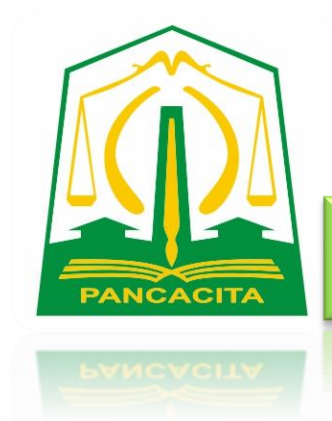
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA.....	2
1.2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi.....	2
1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPR Aceh	8
1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis (Renstra)	15
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRA	17
2.3 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019.....	23
3.1.1 Capaian Kinerja Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022	23
3.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRA yang diperjanjikan dengan Gubernur Aceh Tahun 2022	25
3.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja.....	109
3.3 Realisasi Anggaran	110
BAB IV PENUTUP	116
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Sekretariat DPRA Tahun 2022	3
Gambar 1.2	Susunan Publikasi Laporan Kinerja Sekretariat DPRA pada Website PPID	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pejabat Eselon Sekretariat DPRA	10
Tabel 1.2	Jumlah PNS dan Non ASN pada Masing-Masing Bagian Sekretariat DPRA	10
Tabel 1.3	Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Golongan	10
Tabel 1.4	Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.5	Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional	11
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana yang Tersedia pada Sekretariat DPRA	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRA	17
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Sekretariat DPRA	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRA Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022.....	24
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Tahun 2022	25
Tabel 3.4	Daftar Rancangan Qanun Aceh Prolega Prioritas Tahun 2022.....	27



**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bab I berisi:

1. Latar Belakang
2. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA
3. Sistematika Penyusunan Laporan kinerja (LKj)

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBN/APBA), dan setiap Instansi Pemerintah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) sebagai suatu proses untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada dilingkungan Pemerintah Aceh, Sekretariat DPRA diwajibkan menyampaikan laporan kinerjanya kepada Gubernur Aceh sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dengan adanya pengukuran capaian kinerja diharapkan dapat mendorong Sekretariat DPRA untuk dapat terus meningkatkan kinerjanya melalui transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan program yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRA ini sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh.

1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA

1.2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat DPRA telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA.

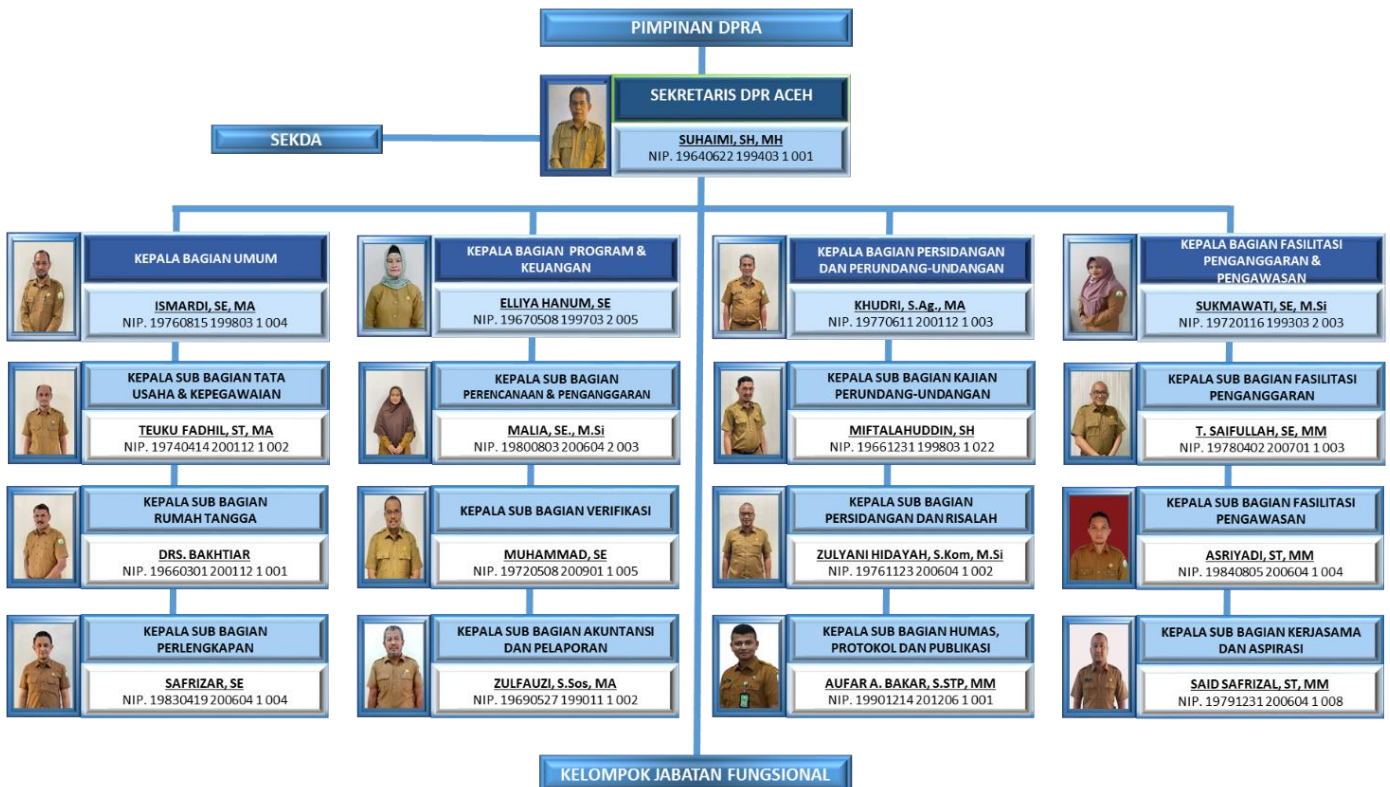
Menurut pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 menyatakan bahwa Sekretariat DPRA adalah perangkat daerah sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA; ayat (2) bahwa Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; ayat (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPR Aceh dan ayat (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA yang membawahi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Bagian Umum yang terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan
2. Bagian Program dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Subbagian Verifikasi;
 - c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
 - b. Subbagian Persidangan dan Risalah;
 - c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi
4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari:
 - a. Subbagian Fasilitas Penganggaran;
 - b. Subbagian Fasilitas Pengawasan;
 - c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Sekretariat DPRA Tahun 2022



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2023)

Susunan Organisasi Sekretariat DPRA sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 1.2, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRA

Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengkoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

2. Bagian Umum

Bagian umum merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi DPRA dan Kesekretariatan DPRA. Bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan DPRA dan Sekretariat DPRA. Bagian Umum membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRA dan Pimpinan DPRA, melaksanakan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan, menyusun administrasi kepegawaian, menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.
- b. Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor Sekretariat, rumah jabatan pimpinan

- DPRA dan lingkungan kompleks perumahan DPRA serta pengelolaan klinik kesehatan, memfasilitasi penyiapan tempat, sarana rapat dan pertemuan.
- c. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA, mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan, merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan, menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA, mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRA, mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA dan melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

3. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRA dan Kesekretariatan DPRA. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran, verifikasi dan akuntansi dan pelaporan. Bagian Program dan Keuangan membawahi beberapa sub bagian, yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan, menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya, menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.
- b. Subbagian Verifikasi mempunyai tugas merencanakan pemverifikasian keuangan, memverifikasi pertanggungjawaban keuangan, mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan PPK untuk mengajukan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS, memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan penatausahaan keuangan, menyusun pengadministrasian dan pembukuan

keuangan, mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA, menganalisis laporan keuangan, menganalisis laporan kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan merupakan unsur pelaksana teknis yang memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRA. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan kajian perundang-undangan, persidangan, risalah, humas, protokol dan publikasi DPRA.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

- a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, memfasilitasi penyediaan tenaga advokasi untuk kelembagaan DPRA, membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik, menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan, membuat konsep bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA, menyiapkan bahan pembahasan Rancangan Qanun Aceh dan menyusun bahan daftar inventaris masalah..
- b. Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, menyusun risalah, notulensi dan catatan rapat-rapat, menyiapkan materi/bahan rapat DPRA, memfasilitasi rapat-rapat DPRA dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRA.
- c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyusun bahan komunikasi dan publikasi, merancang administrasi kunjungan kerja DPRA, menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRA, merencanakan kegiatan DPRA dan merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRA.

5. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang fasilitas penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan fasilitas penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan membawahi beberapa bagian yaitu:

- a. Subbagian Fasilitas Penganggaran mempunyai tugas merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dan menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
- b. Subbagian Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan, merancang bahan rapat-rapat internal DPRA, menganalisa bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRA, menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
- c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas memfasilitasi reses DPRA, merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi, menyusun pokok-pokok pikiran DPRA dan melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRA dan DPRA dengan pihak lain.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan; fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Adapun jabatan fungsional yang terdapat pada Sekretariat DPRA ada 2, yaitu:

- a. Jabatan Fungsional Arsiparis terdiri dari Arsiparis Penyelia dan Arsiparis Ahli Muda;
- b. Jabatan Fungsional Dokter yaitu Dokter Ahli Madya.

1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 5 menyatakan bahwa Sekretariat DPRA mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- b. Penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA;
- d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA;
- e. Menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengkoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- f. Memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA;
- e. Pemberian Pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

1. Isu-Isu Strategis

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, maka yang menjadi isu- isu strategis Sekretariat DPRA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Perlunya penyusunan RKT DPRA yang tepat waktu dan mencakup keseluruhan pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, agar terjadi sinkronisasi rencana kerja Sekretariat DPRA dengan rencana kerja DPRA, sehingga dapat dijadikan salah satu dasar perencanaan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRA yang lebih akurat dan akuntabel.
2. Tuntutan standar kinerja DPRA yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRA serta pemanfaatan anggaran dan tenaga ahli yang tersedia;
3. Kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA relatif belum sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kesiapan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi relatif belum maksimal untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRA sebagai lembaga perwakilan.

2. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pegawai Sekretariat DPRA berjumlah 434 orang terdiri dari 136 orang Pegawai Negeri Sipil dan 298 Tenaga Kontrak, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pejabat Eselon Sekretariat DPRA

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II/a	1	0	1
2	Eselon III/a	2	2	4
3	Eselon IV/a	11	1	12
Jumlah		14	3	17

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2023)

Tabel 1.2
Jumlah PNS dan Non ASN Pada Masing-Masing Bagian Sekretariat DPRA

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bagian Umum	238	53	289
2	Bagian Program dan Keuangan	8	20	28
3	Bagian Persidangan dan Risalah	30	22	52
4	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	32	31	63
Jumlah		308	126	434

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2023)

Tabel 1.3
Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan IV	8	6	14
2	Golongan III	61	42	103
3	Golongan II	17	2	19
4	Golongan I	0	0	0
Jumlah		86	50	136

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2023)

Tabel 1.4
Jumlah PNS Sekretariat DPRA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	18	13	31
2	S1	43	29	72
3	D3	5	4	9
4	SMA	20	4	24
Jumlah		86	50	136

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2023)

Tabel 1.5
Jumlah PNS Sekretariat DPRA
Berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dokter	0	1	1
2	Arsiparis	2	0	2
Jumlah		2	1	3

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2023)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRA yang digunakan untuk mendukung kinerja staf dan Anggota DPRA dapat dilihat pada Tabel I.6.

Selain dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana, Sekretariat DPRA juga mendapat alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022 sebesar:

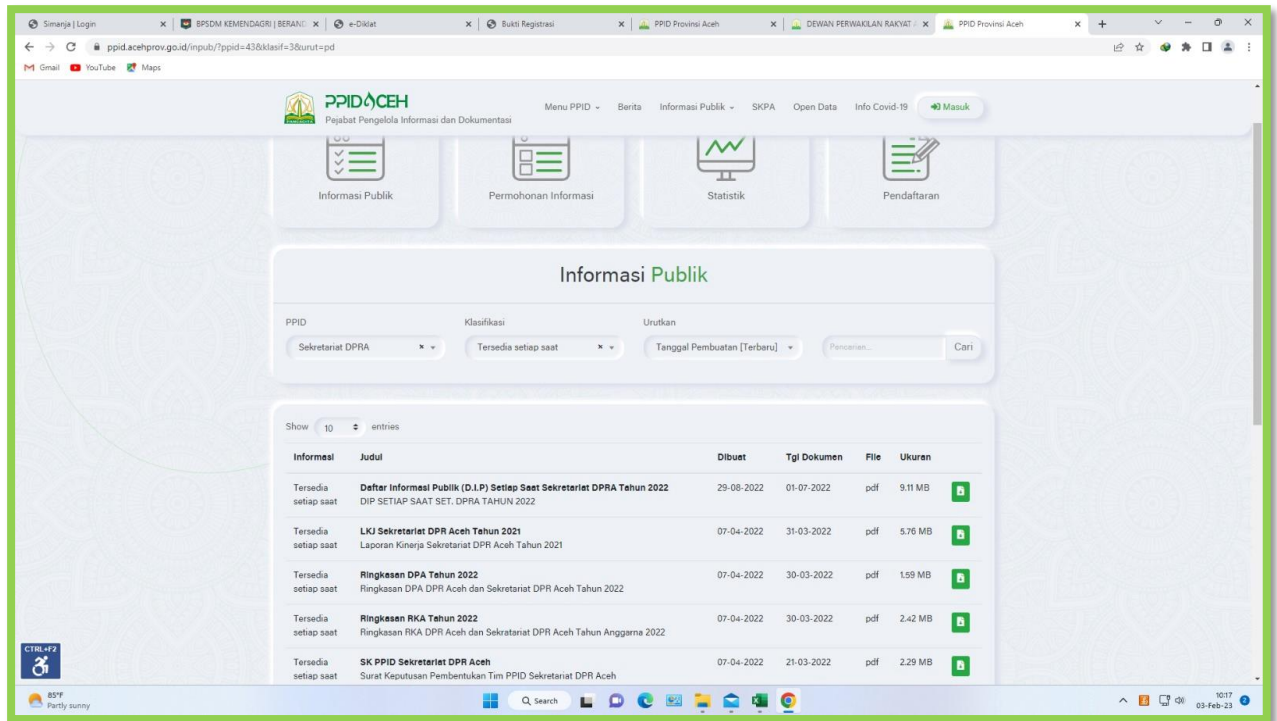
- Pendapatan Rp. 19.620.000,00
- Belanja Rp. 225.812.932.571,00

Tabel I.6
Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Pada Sekretariat DPRA

No.	Uraian	Jumlah	Tahun 2022 (Rp.)
A.	Tanah	3	72,524,678,500.00
1	Tanah	3	72,524,678,500.00
B.	Peralatan dan Mesin	11,676	104,368,990,643.22
1	Alat Besar	205	3,935,785,950.00
2	Alat Angkutan	84	29,520,235,960.00
3	Alat Bengkel dan Ukur	34	80,975,000.00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,201	56,707,508,116.00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	152	3,364,231,100.00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	228	1,904,491,964.22
7	Alat Laboratorium	5	5,403,000.00
8	Komputer	708	8,668,965,355.00
9	Alat Eksplorasi	1	95,130,000.00
10	Rambu - Rambu	58	86,264,198.00
C.	Gedung dan Bangunan	358	142,476,651,493.00
1	Bangunan Gedung	127	136,967,675,328.00
2	Monumen	141	582,390,000.00
3	Tugu Titik Kontrol / Pasti	90	4,926,586,165.00
D.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	48	18,777,020,089.00
1	Jalan dan Jembatan	6	6,357,684,100.00
2	Bangunan Air	24	8,886,939,689.00
3	Instalasi	8	1,865,804,500.00
4	Jaringan	10	1,666,591,800.00
E.	Aset Tetap Lainnya	12,783	3,413,204,795.00
	Bahan Perpustakaan	12,783	3,413,204,795.00
F.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Total	24,868	341,560,545,520.22

Sumber: Sub Bagian Perlengkapan (2023).

Gambar 1.2
Publikasi Laporan Kinerja Sekretariat DPRA pada Website PPID
(<https://ppid.acehprov.go.id>)



1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

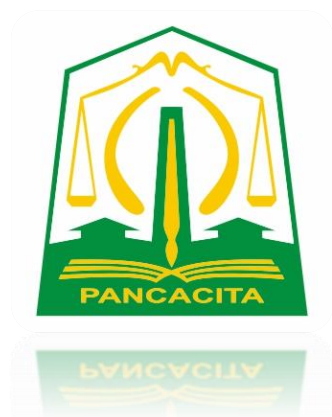
B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2022

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Bab II berisi :

1. Perencanaan Strategis (Renstra)
2. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRA
3. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan adanya agenda penyusunan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRA disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRA 2017-2022. Dengan berpedoman pada RPJMA dan Renstra tersebut, maka Sekretariat DPRA menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran Renstra untuk masing-masing tahun rencana. Renja selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan penilaian kinerja tahunan yang disusun setelah alokasi anggaran disahkan dan merupakan wujud nyata komitmen kinerja Sekretaris DPRA kepada Gubernur Aceh.

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta bersifat jangka menengah, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen

rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka tujuan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2017-2022 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA selama periode tersebut, dengan maksud memberikan kontribusi yang maksimal bagi DPRA dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Aceh Periode 2017-2022. Adapun visi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 adalah ***“terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”*** dengan misi, tujuan, dan sasaran yang sesuai untuk kinerja penyelenggaraan bidang urusan Sekretariat DPRA.

Visi diatas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) misi sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai ke-Islaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Iktikad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki ;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanankesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan berintegritas;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;

8. Mengembangkan dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence base planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan, dan
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRA

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRA, maka Sekretariat DPRA sesuai dengan RPJMA Tahun 2017-2022 merupakan salah satu pelaksana untuk mewujudkan Misi ke tiga yaitu “**Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki**” dengan tujuan “**meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki**”, dan sasaran “**tuntasnya aturan turunan UU-PA**”, serta masuk dalam kategori Unggulan Aceh Hebat yang ke-10 yaitu **Aceh Damê**.

Pernyataan strategis dan arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRA dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRA

Visi :		Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani	
Misi :		Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Tuntasnya aturan turunan UU-PA	Penuntasan penyelesaian turunan UU-PA	Mengoptimalkan komitmen eksekutif dan legislative dalam pelaksanaan Qanun turunan UU-PA

Sumber : RPJMA Tahun 2017-2022

Sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMA ini, diharapkan dengan adanya keberadaan Sekretariat DPRA dapat menjembatani hubungan antara Legislatif dan Eksekutif sehingga program-program DPRA dapat didukung dengan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh.

Adapun tujuan dan sasaran serta indikator jangka menengah Sekretariat DPRA yang ditetapkan selama 5 tahun dalam RPJMA Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Sekretariat DPRA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Persentase Qanun yang diselesaikan	(80%) 15 Qanun	(85%) 15 Qanun	(85%) 15 Qanun	(90%) 15 Qanun	(95%) 15 Qanun

Sumber : RPJMA Tahun 2017-2022

Dengan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Persentase tingkat capaian realisasi s/d tahun 2022}}{\text{Persentase target RPJMA}} \times 100\%$$

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dapat diartikan sebagai kesepakatan kinerja yang terukur antara penerima dan pemberi amanah. Perjanjian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja juga merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah;
2. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRA telah membuat komitmen yang mempresentasikan kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022 dengan Gubernur Aceh yang mengacu pada sasaran jangka menengah Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2017-2022.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Persentase Qanun yang diselesaikan	100%
2.	Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase kegiatan DPRA yang terfasilitasi	100%

Capaian Perjanjian Kinerja di atas diukur berdasarkan:

1. Indikator **“Persentase Qanun yang diselesaikan”** tercapai berdasarkan Realisasi fasilitasi Pembahasan Rancangan Qanun Aceh yang terlaksana dan diselesaikan yang merupakan fasilitasi Sekretariat DPRA terhadap fungsi legislasi DPRA, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Jumlah Realisasi pembahasan rancangan qanun yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Target pembahasan rancangan qanun yang direncanakan}} \times 100\%$$

2. Indikator **“Persentase Kegiatan DPRA yang Terfasilitasi”** tercapai berdasarkan realisasi fasilitasi Terhadap fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan DPRA, serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan DPRA yang terlaksana}}{\text{Jumlah Target Kegiatan DPRA yang direncanakan}} \times 100\%$$

Untuk tercapainya perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur Aceh Periode 2017-2022 dilaksanakan melalui Program Pembangunan Aceh yang diperuntukkan bagi Sekretariat DPRA Tahun 2022 yaitu melalui **“Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD”** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 225.812.932.571,00**

Selanjutnya untuk Tahun 2022, Sekretariat DPRA juga telah menyusun Perjanjian Kinerja Berjenjang untuk Pejabat Eselon III dan IV serta Pejabat

Fungsional. Penyusunan Perjanjian Kinerja berjenjang ini telah dimulai sejak Tahun 2019 dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Perjanjian Kinerja Berjenjang ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan antara Pejabat Eselon III dan IV serta Pejabat Fungsional dengan Sekretaris DPRA.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRA
3. Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja disajikan dalam bab ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretaris DPRA untuk Tahun 2022 yang memuat realisasi atau capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja serta akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2022. Pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator input, output maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran.

Capaian kinerja diukur berdasarkan perjanjian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang disusun diawal tahun. Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dari bagian-bagian yang bertanggungjawab, selanjutnya data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali untuk memperoleh klarifikasi dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja ini. Data-data capaian kinerja yang telah didapat kemudian dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu;
- c. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah (target pada Renstra) yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
- d. Analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang dalam rangka keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja.

3.1.1 Capaian Kinerja Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022

Kinerja Sekretariat DPRA sesuai RPJMA Tahun 2017-2022 diukur berdasarkan indikator sasaran **“Persentase Qanun yang diselesaikan”** dengan persentase target

capaian sampai akhir periode RPJMA adalah sebanyak 75 Qanun (95%). Adapun persentase penyelesaian Qanun sampai dengan tahun 2022 (akhir RPJMA) adalah sebanyak 40 Qanun (53,33%), dengan persentase tingkat capaian kinerja sebesar 56,14% dari target yang telah ditetapkan (95%), berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Persentase tingkat capaian realisasi s/d tahun 2022}}{\text{Persentase target RPJMA}} \times 100\% = \frac{53,33\%}{95\%} \times 100\% = 56,14\%$$

Rincian pengukuran kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRA
Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	Real s/d 2022	% Capaian RPJMA s/d 2022	Kriteria
				Target	Real	% Tingkat Capaian	Target	Real	% Tingkat Capaian	Target	Real	% Tingkat Capaian	Target	Real	% Tingkat Capaian	Target	Real	% Tingkat Capaian				
1.	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Persentase Qanun yang diselesaikan	80%	80%	100%	85%	73%	86%	85%	53%	62%	90%	27%	30%	95%	33%	35%	95%	53%	56%	Rendah
				15 Qanun	12 Qanun		15 Qanun	11 Qanun		15 Qanun	8 Qanun		15 Qanun	4 Qanun		15 Qanun	5 Qanun		75 Qanun	40 Qanun		

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 selama periode Renstra tahun 2017-2022 belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan beberapa Rancangan Qanun Aceh masih menunggu hasil E-fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat beberapa substansi dan materi yang perlu ditambahkan, diakomodir, disempurnakan dan diperlukan kajian lebih mendalam.

Fungsi Sekretariat DPRA dalam hal ini hanya sebatas memfasilitasi kegiatan pembahasannya dan fasilitasi pembahasan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, namun penyelesaian Pembahasan merupakan kewenangan DPRA sendiri, sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRA untuk indikator ini sangat bergantung pada kinerja DPRA. Sekretariat DPRA juga telah mengupayakan percepatan kegiatan pembahasan baik dilakukan secara tertulis melalui Pimpinan ataupun dalam kesempatan disetiap kegiatan rapat-rapat Pimpinan

dan Rapat Alat Kelengkapan Dewan, agar pembahasan rancangan Qanun dapat segera dituntaskan.

3.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRA yang diperjanjikan dengan Gubernur Aceh Tahun 2022

Capaian kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022 dianalisis berdasarkan pengukuran kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris DPRA dengan Gubernur Aceh tahun 2022, dapat dilihat dalam Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Kriteria
			Tahun 2021			Tahun 2022			
			Target	Real	%	Target	Real	%	
1	Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase Pembahasan Rancangan Qanun yang diselesaikan	100%	92%	92	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Persentase Kegiatan DPRA yang terfasilitasi	100%	89%	89	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan DPRA yang tersedia	1 Dok	1 Dok	100	-	-	-	

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021 yaitu “**Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan DPRA yang tersedia**” dengan target 1 Dokumen, tidak diperjanjikan lagi di tahun 2022, dikarenakan indikator tersebut lebih sesuai dan telah tertuang dalam perjanjian kinerja Eselon III/IV.

Berdasarkan Tabel Pengukuran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur telah

terlaksana sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (94%), maka terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6%.

Adapun rincian uraian analisis capaian kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022 serta perbandingan dengan capain kinerja pada tahun 2021 untuk masing-masing indikator kinerja dari sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran pada Tabel 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Qanun yang diselesaikan



Fasilitasi Pembahasan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Aceh Tahun 2022 dilaksanakan melalui **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**, kegiatan **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**, Sub Kegiatan **Pembahasan Rancangan Perda**, dan telah difasilitasi sesuai dengan yang direncanakan yaitu sebanyak 12

Rancangan Qanun (100%), namun hanya 5 Rancangan Qanun (42%) yang ditetapkan dalam rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Berikut formulasi pengukuran kinerja “Persentase Pembahasan Rancangan Qanun yang diselesaikan” yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Hasil} &= \frac{\text{Jumlah realisasi pembahasan rancangan qanun yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Target Pembahasan rancangan qanun yang direncanakan}} \times 100 \\ &= \frac{12 \text{ Kegiatan}}{12 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan uraian di atas, maka persentase capaian kinerja **persentase qanun yang diselesaikan** tahun 2022 adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, Jumlah pembahasan Rancangan Qanun yang difasilitasi adalah sebanyak 12 Rancangan Qanun dari 13 yang direncanakan (92%), namun hanya 4 Rancangan Qanun yang selesai dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna (32%). Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan pencapaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran murni untuk mendukung sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.485.834.481, dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 30.145.117.481,-, dengan realisasi sebesar Rp. 16.039.413.708,- (53,21%). Penambahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengalihan anggaran dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang tidak dapat terlaksana akibat belum adanya regulasi/aturan yang berlaku, sehingga anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan sosialisasi rancangan Qanun. Rendahnya serapan dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2022 aturan kegiatan sosialisasi rancangan Qanun belum juga tersedia. Fasilitas pembahasan rancangan qanun tahun 2022 dapat di lihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

TABEL 3.4
DAFTAR RANCANGAN QANUN ACEH
PROLEGA PRIORITAS TAHUN 2022

NO	URAIAN	LATAR BELAKANG	PENGUSUL	PEMBAHAS	KET.
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Majelis Pendidikan Aceh	Tindak lanjut pasal 220 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamankan pembentukan Majelis Pendidikan Aceh dan penguatan fungsi MPA sebagai salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.	Inisiatif DPRA	Komisi VI	Selesai pembahasan dan Setuju Untuk Ditetapkan

2	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	- Karena angka pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di Aceh sudah sangat mengkhawatirkan dan bisa dibilang darurat. Kejahatan ini masuk dalam kategori <i>extra ordinary crime</i>. - Qanun Jinayat hanya mengatur hukuman cambuk saja dan berpeluang kepada pelaku tidak dipenjara, maka diperlukan perubahan qanun ini agar dapat mengatur selain cambuk juga dapat dipenjara.	Inisiatif DPRD	Komisi I	Selesai Pembahasan dan menunggu hasil E-fasilitasi ke Kemendagri
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	- Menindaklanjuti pasal 8 dan pasal 10 UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah meliputi penetapan kebijakan pembinaan pengembangan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan oleh daerah masing-masing. - Untuk itu perlu pengaturan lebih lanjut melalui qanun Aceh.	Prakarsa Pemerintah Aceh	Badan Legislasi	Selesai pembahasan dan Setuju Untuk Ditetapkan
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Cadangan Pangan	- Tindak lanjut dari Pasal 23 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan kem Sudah menerima hasil E-fasilitasi dari kemendagri andirian pangan dan ketahanan pangan, maka pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. - Karena tugas penyediaan pangan merupakan tanggungjawab bersama, maka kewenangan dalam penyelenggaraan pangan ini juga diberikan kepada pemerintah daerah, oleh	Prakarsa Pemerintah Aceh	Komisi II	Selesai pembahasan dan Setuju Untuk Ditetapkan

		karena itu perlu pengaturan lebih lanjut melalui qanun			
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Tindak lanjut pasal 9 dan pasal 10 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi persoalan lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu 30 tahun. - RPPLH Aceh adalah perencanaan berbasis <i>Ekoregion</i> yang diharapkan dapat mengatur upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup pada setiap <i>ekoregion</i> yang ada di Provinsi Aceh.	Prakarsa Pemerintah Aceh	Komisi IV	Selesai Pembahasan dan menunggu hasil E-fasilitasi ke kemendagri
6	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nangroe.	- Belum optimalnya peran wali Nangroe sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 dan 97 UUPA - Belum optimalnya fungsi wali Nangroe sebagai penyelenggara keistimewaan dan kekhususan Aceh.	Inisiatif DPR Aceh/Sisa Tahun 2021	Pansus LWN	Selesai Pembahasan dan menunggu hasil E-fasilitasi ke kemendagri
7	Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh	- Masyarakat Aceh kesulitan dalam memanfaatkan kelimpahan dan keanekaragaman komoditas Aceh antara lain disebabkan karena Aceh rentan terhadap efek dari perubahan harga di pasar komoditas global.	Inisiatif DPR Aceh/Sisa Tahun 2021	Pansus TNKA	Selesai pembahasan dan Setuju Untuk Ditetapkan

		- Dalam mengatasi kendala tersebut diperlukan campur tangan dari Pemerintah Aceh untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam bentuk regulasi yang mengatur mengenai aktivitas tata niaga komoditas Aceh dari hulu hingga hilir.			
8	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan	- Menindaklanjuti pasal 224 dan pasal 225 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan bahwa setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya kesehatan diatur dalam qanun. - Dalam mewujudkan amanah dari UU sebagaimana tersebut di atas, maka program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) perlu diperkuat dengan membentuk Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Aceh (BPJKA). - Untuk mewujudkan 2 hal di atas, maka Qanun Aceh No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan perlu dilakukan perubahan.	Inisiatif DPR Aceh/Sisa Tahun 2021	Komisi V	Selesai Pembahasan dan menunggu hasil E-fasilitasi ke kemendagri
9	Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh	- Menindaklanjuti pasal 221 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan bahwa bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur melalui qanun.	Inisiatif DPR Aceh/Sisa Tahun 2021	Komisi VI	Selesai pembahasan dan Setuju Untuk Ditetapkan

10	Rancangan Qanun Aceh tentang Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat Aceh	Sebagai tindak lanjut dari <i>MoU Helsinki</i> No. 1.4.2 yang menyebutkan bahwa legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam <i>kovenan internasional Perserikatan Bangsa-bangsa</i> mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.	Inisiatif DPR Aceh/Sisa Tahun 2021	Badan Legislasi	Sudah menerima hasil E-fasilitasi dari kemendagri, Surat No.100.2.1.6 /8259/OTDA Ditolak karena UU 39 Tahun 1999 tidak mendelegasikan pengaturan pelaksanaan HAM dalam perda.
11	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Alam Rakyat Aceh	Menindaklanjuti pasal 160 dan pasal 161 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Juncto Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh, maka dipandang perlu pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pengelolaan bersama minyak dan gas bumi Aceh melalui qanun Aceh.	Inisiatif DPR Aceh/Sisa Tahun 2021	Komisi III	Selesai Pembahasan dan menunggu hasil E-fasilitasi ke kemendagri
12	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan	Menindaklanjuti pasal 213 dan pasal 214 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengenai tata cara pemberian hak atas tanah diatur lebih lanjut melalui qanun Aceh.	Prakarsa Pemerintah Aceh/Sisa Tahun 2021	Komisi I	Selesai Pembahasan dan menunggu hasil E-fasilitasi ke kemendagri

2. Persentase Kegiatan DPRA yang Terfasilitasi

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator ini dihitung berdasarkan fasilitasi Sekretariat DPRA terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan serta kegiatan penyerapan dan Penghimpunan aspirasi masyarakat yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tahun lalu, persentase capaian kinerja indikator ini meningkat sebesar 12,4%.

Berikut formulasi pengukuran kinerja “Persentase Kegiatan DPRA yang Terasilitasi” yaitu:

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Jumlah kegiatan DPRA yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan DPRA direncanakan}} \times 100\% = \frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**, dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pembahasan kebijakan Anggaran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Fungsi penganggaran DPRA yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBA yang diajukan oleh Gubernur Aceh dengan memfasilitasi kegiatan pembahasan kebijakan anggaran ini terlaksana sesuai target yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Formulasi pengukuran capaian kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{6 \text{ Kegiatan}}{6 \text{ kegiatan}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan 6 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

KUA dan PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) melalui beberapa pendekatan perencanaan, baik secara teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Aceh (Musrenbang Aceh). Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023 disampaikan Pemerintah Aceh kepada DPRA melalui surat Nomor 910/9168 tanggal 4 Juli 2022 dan Nomor 910/10426 tanggal 13 Juli

2022 untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan. Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 100%, dimana telah terlaksananya fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS sampai dengan penandatanganan persetujuan dokumen KUA dan PPAS antara DPRA dan Pemerintah Aceh.



Alokasi anggaran pagu murni untuk memfasilitasi kegiatan ini sebesar Rp.587.811.750,- dan telah diubah menjadi Rp.80.137.840,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.657.840,- (99,40%). Penyesuaian anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pembahasan yang relatif singkat

dan tidak dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka melakukan konsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri.

Rapat Pembahasan KUA Tahun 2022 yang terlaksana yaitu:

NO	NO/TGL SURAT	PERIHAL	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	No. 160/1534, tgl. 07 Juli 2022	Rapat Banmus penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS T.A 2023	Kamis, 14 Juli 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
2	No. 160/1562, tgl. 14 Juli 2022	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan Agenda Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS T.A 2023	Jum'at, 15 Juli 2022, Pukul: 14.30 - Selesai	Terlaksana
3	No. 005/1592, Tgl. 18 Juli 2022	Pembahasan Ranc. KUA-PPAS T.A 2023	Selasa, 19 Juli 2022 Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana

4	No. 005/1593, Tgl. 18 Juli 2022	Pembahasan Ranc. KUA-PPAS T.A 2023	Selasa, 19 Juli 2022 Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
5	No. 005/1574, Tgl. 19 Juli 2022	Pembahasan Ranc. KUA-PPAS T.A 2023	Rabu, 20 Juli 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Tidak Terlaksana
6	No. 005/1574, Tgl. 19 Juli 2022	Pembahasan Ranc. KUA-PPAS T.A 2023	Jum'at, 22 Juli 2022, Pukul : 14.30 - Selesai	Terlaksana
7	No. 005/1575, Tgl. 19 Juli 2022	Rapat bersama Banggar DPR Aceh dengan TAPA dengan didampingi SKPA terkait Rancangan KUA dan Rancangan PPAS T.A 2023	-	Tidak Terlaksana
8	No. 005/1600, Tgl. 19 Juli 2022	Rapat Internal Banggar DPR Aceh terkait Rancangan KUA- PPAS T.A 2023	11.00 - Selesai	Terlaksana
9	No. 005/1640, Tgl. 22 Juli 2022	Perubahan Jadwal Pembahasan Rancangan KUA-PPAS T.A 2023	Senin, 25 Juli 2022, Pukul : 20.30 - Selesai	Terlaksana
10	No. 005/1641, Tgl. 22 Juli 2022	Perubahan Jadwal Pembahasan Rancangan KUA-PPAS T.A 2023 (Penundaan Jadwal pembahasan)	Sampai ada pemberitahuan selanjutnya	Terlaksana

Rapat Pembahasan PPAS Tahun 2022 yang terlaksana yaitu:

NO	NO/TGL SURAT	PERIHAL	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	No. 005/1789, Tgl. 2 Agustus 2022	Rapat bersama Banggar DPR Aceh dengan TAPA terkait Penyusunan Jadwal Pembahasan PPAS T.A 2023	Rabu, 3 Agustus 2022, Pukul :10.00 - Selesai	Terlaksana
2	No. 005/1790, Tgl. 2 Agustus 2022	Rapat bersama Banggar DPR Aceh dengan TAPA terkait Penyusunan Jadwal Pembahasan PPAS T.A 2023	Rabu, 3 Agustus 2022, Pukul :10.00 - Selesai	Terlaksana
3	No. 005/1809, Tgl. 3 Agustus 2022	Menindaklanjuti salah satu Berita Acara Rapat Banggar DPR Aceh bersama TAPA terkait Pembahasan PPAS T.A 2023	Rabu s.d Minggu, 3 Agustus s.d. 6 Agustus	Terlaksana
4	No. 005/1873, Tgl. 11 Agustus 2022	Rapat Banggar DPR Aceh dengan TAPA terkait Rancangan KUA T.A 2023	Kamis, 11 Agustus 2022, Pukul : 20.30 - Selesai	Terlaksana

5	No. 005/1839, Tgl. 8 Agustus 2022	Rapat bersama Banggar DPR Aceh dengan TAPA terkait Penyusunan Jadwal Pembahasan PPAS T.A 2023	Senin, 14 Agustus 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
6	No. 005/1841, Tgl. 8 Agustus 2022	Rapat bersama Banggar DPR Aceh dengan TAPA terkait Pendapatan Asli Aceh (PAA) pada Rancangan PPAS T.A 2023	Senin, 14 Agustus 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
7	No. 160/1925, Tgl. 16 Agustus 2022	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS T.A 2023	Kamis, 18 Agustus 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
8	No. 005/1943, Tgl. 18 Agustus 2022	Rapat Internal Badan Anggaran DPR Aceh	Kamis, 18 Agustus 2022, Pukul : 13.00 - Selesai	Terlaksana

2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPR ACEH DENGAN AGENDA: PENJADWALAN RAPAT PARIPURNA DPR ACEH TAHUN 2022 DALAM RANGKA ; PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRA; PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA PERUBAHAN DAN RANCANGAN PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022; USUL PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DPRA TAHUN 2023

Senin, 5 September 2022



Kesimpulan :

Badan Musyawarah DPR Aceh menetapkan sebagai berikut :

- Rapat Paripurna DPRA dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 September 2022, pukul 20:30 WIB
- Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh sisa masa jabatan Tahun 2019-2024 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022.
- Badan Musyawarah DPR Aceh menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPR Aceh untuk dapat mengirimkan 2 (dua) orang Anggotanya untuk ditetapkan sebagai Anggota Panja RKT Tahun 2023.
- Pelaksanaan Reses III Pimpinan dan Anggota DPR Aceh, Badan Musyawarah menyerahkan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk menjadwalkan dengan mempedomani RKT DPR Aceh Tahun 2022 yang direncanakan pelaksanaan nya pada bulan Oktober 2022.
- Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023, Badan Musyawarah DPR Aceh menyerahkan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk menjadwalkannya.

Keterangan : Hadir : 26 Orang Tidak Hadir : 15 Orang

Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 100%, dimana telah terlaksananya fasilitasi pembahasan Perubahan KUA dan PPAS sampai dengan penandatanganan persetujuan dokumen Perubahan KUA dan PPAS antara DPRA dan Pemerintah Aceh.

Alokasi anggaran murni untuk memfasilitasi kegiatan ini sebesar Rp.504.802.800,- dan pada perubahan disesuaikan menjadi Rp.75.132.490,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.047.830,- (58,63%). Walau telah dilakukan perubahan, serapan anggaran belum maksimal dikarenakan durasi pelaksanaan pembahasan yang sangat singkat.

Rapat-rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terlaksana yaitu:

NO	NO/TGL SURAT	PERIHAL	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	No. 910/13940, Tgl. 2 September 2022	Penyampaian surat Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A 2022	Jum'at, 2 September 2022	Terlaksana
2	No. 160/2065, Tgl. 2 September 2022	Rapat Banmus Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Rancangan KUA Perubahan dan Rancangan PPAS Perubahan T.A 2022	Senin, 5 September 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana
3	No. 160/2079, Tgl. 5 September 2022	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan Agenda Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS T.A 2022	Senin, 5 September 2022, Pukul : 20.30 - Selesai	Terlaksana
4	No. 005/2089, Tgl. 5 September 2022	Rapat Internal Badan Anggaran DPR Aceh terkait Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS T.A 2022	Selasa, 6 September 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana

5	No. 005/2116, Tgl. 6 September 2022	Rapat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran DPR Aceh terkait Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS T.A 2022	Rabu s.d Kamis, 7 s.d 8 September 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana
6	No. 005/2104, Tgl. 8 September 2022	Rapat bersama Badan Anggaran DPR Aceh dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS T.A 2022	Kamis, 8 September 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana

3. Sub Kegiatan Pembahasan APBA

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%, yang dilaksanakan dengan memfasilitasi DPRA dengan Pemerintah Aceh untuk melakukan Pembahasan APBA dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.232.901.000,-. Kegiatan ini juga mengalami penyesuaian anggaran menjadi Rp. 891.040.490,-, dikarenakan beberapa Anggota Badan Anggaran DPRA tidak melaksanakan Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah. Serapan anggaran sub kegiatan ini sudah maksimal dengan realisasi sebesar Rp.868.744.279,- (97,50%).

Rapat-rapat Pembahasan APBA yang terlaksana yaitu:

NO	NO/TGL SURAT	PERIHAL	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	No. 005/2453, Tgl. 25 Oktober 2022	Rapat Internal Badan Anggaran DPR Aceh terkait RAPBA T.A 2023	Rabu, 26 Oktober 2022, Pukul : 11.00 - Selesai	Terlaksana
2	No. 005/2473, Tgl. 26 Oktober 2022	Rapat Badan Anggaran DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait RAPBA T.A 2023	Senin, 31 Oktober 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana

3	No. 005/2565, Tgl. 04 November 2022	Rapat Internal Badan Anggaran DPR Aceh terkait Perumusan Hasil Pembahasan RAPBA T.A 2023	Sabtu, 5 November 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
4	No. 005/2566, Tgl. 04 November 2022	Rapat Badan Anggaran DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait Finalisasi Pembahasan RAPBA T.A 2023	Senin, 7 November 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
5	No. 005/2584, Tgl. 07 November 2022	Rapat Badan Anggaran DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait Finalisasi Pembahasan RAPBA T.A 2023	Selasa, 8 November 2022, Pukul : 16.00 - Selesai	Terlaksana
6	No. 005/2594, Tgl. 08 November 2022	Rapat Internal Badan Anggaran DPR Aceh terkait Perumusan Hasil Pembahasan RAPBA T.A 2023	Rabu, 9 November 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
7	No. 005/2668, Tgl. 17 November 2022	Rapat Lanjutan Badan Anggaran DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait Finalisasi Pembahasan RAPBA T.A 2023	Jum'at, 18 November 2022, Pukul : 20.00 - Selesai	Terlaksana
8	No. 005/2693, Tgl. 21 November 2022	Rapat Finalisasi Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh T.A 2023	Senin, 21 November 2022, Pukul : 20.00 - Selesai	Terlaksana

Fasilitasi Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi DPRA :

- Koordinasi terkait RAPBA tahun 2023 ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada tanggal 22-29 Agustus 2022.
- Konsultasi dan koordinasi ke Kemendagri RI terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 Tanggal 24-27 Agustus 2022 ke Jakarta.
- Penyampaian bahan administrasi dan dokumen terkait Pembahasan APBA T.A 2023 dan Perubahan APBA T.A 2022 ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I di Jakarta dari tanggal 25 s/d 28 September 2022.

- Koordinasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 ke Jakarta dari tanggal 12 s/d 15 September 2022.
- Koordinasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh T.A pada tanggal 19 - 22 Sptember 2022 ke Jakarta.
- Konsultasi terkait APBA Tahun Anggaran 2023 ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta pada tanggal 20 s/d 23 Oktober 2022.

4. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBA

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%, yang dilaksanakan dengan memfasilitasi DPRA dan Pemerintah Aceh untuk melakukan Pembahasan Perubahan APBA dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.076.745.750,-. Kegiatan ini juga mengalami penyesuaian pagu anggaran yang sangat signifikan menjadi Rp.43.842.490,- dikarenakan jadwal pembahasan yang relatif singkat, sehingga beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak perlu dilaksanakan kembali. Walaupun telah dilakukan penyesuaian anggaran, namun serapan anggaran sub kegiatan ini masih jauh dibawah target yaitu Rp.23.904.550,- (54,52%), yang disebabkan karena beberapa agenda rapat tidak terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

Rapat-rapat Pembahasan Perubahan APBA yang terlaksana yaitu:

NO	NO/TGL SURAT	PERIHAL	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	No. 005/2230, Tgl. 16 September 2022	Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA T.A 2022	Selasa s.d Rabu , 20 s.d 21 September 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana
2	No. 005/2423, Tgl. 21 Oktober 2022	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kementerian dalam Negeri terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh T.A 2022	Jum'at, 21 Oktober 2022, Pukul : 16.00 - Selesai	Terlaksana

5. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester

Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan menyebutkan ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah 100% yang dilaksanakan dengan mendistribusikan laporan realisasi anggaran semester pertama (prognosis) kepada Pimpinan dan Anggota DPRA. Pagu anggaran murni untuk sub kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 73.633.735,-, dan setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 8.467.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.467.850,- (100%).

6. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBA

Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah sebesar 100%, dimana Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan oleh Gubernur Aceh kepada DPRA dengan surat Nomor 900/7142 tanggal 17 Mei 2022 dan penyerahannya dalam Rapat Paripurna DPR Aceh tanggal 30 Juni 2022. Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 dengan beberapa alasan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2020.

Jumlah pagu anggaran murni untuk mendukung sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 117.227.400,-, dan setelah perubahan menjadi Rp. 96.505.560,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.505.560,- (100%). Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan memfasilitasi rapat pembahasan dan Perjalanan dinas kunjungan ke lapangan.

Rapat-rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBA yang terlaksana yaitu:

No.	NO/TGL SURAT	PERIHAL	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	04/P-LKPJ/IV/2022, TGL 25 April 2022	Rapat Pembahasan Lanjutan dan Bedah Buku LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Senin, 25 April 2022, Pukul 11.00- Selesai	Terlaksana
2	05/P-LKPJ/V/2022, TGL 09 Mei 2022	Rapat Lanjutan Pembahasan LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Rabu, 11 Mei 2022, Pukul 10.00- Selesai	Terlaksana
3	07/P-LKPJ/V/2022, TGL 12 Mei 2022	Rapat Penjelasan LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 terkait Proyek Multiyears	Rabu, 18 Mei 2022, Pukul 14.00- Selesai	Tidak terlaksana
4	08/P-LKPJ/V/2022, TGL.17 MEI 2022	Penundaan Rapat LKPJ terkait Proyek Multiyears		-
5	11/P-LKPJ/V/2022, TGL.26 MEI 2022	Rapat Finalisasi Penyusunan Rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Sabtu, 28 Mei 2022, Pukul 14.00- Selesai	Terlaksana
6	13/P-LKPJ/V/2022, TGL.27 MEI 2022	Rapat Lanjutan Finalisasi Penyusunan Rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Sanin, 30 Mei 2022, Pukul 16.00- Selesai	Terlaksana
7	14/P-LKPJ/V/2022, TGL.30 MEI 2022	Rapat Lanjutan Finalisasi Penyusunan Rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Selasa, 31 Mei 2022, Pukul 11.00- Selesai	Terlaksana

Adapun kegiatan Kunjungan Lapangan yang dilaksanakan yaitu:

- Kunjungan lapangan terkait penyempurnaan penyusunan rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 ke Dapil II, II, IV dan VIII, pada tanggal 11 Mei 2022.
- Kunjungan lapangan terkait penyempurnaan penyusunan rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 ke Dapil I, V, VI, VII pada tanggal 11 Mei 2022.
- Sinkronisasi data dan realisasi pekerjaan SKPA dalam LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 27-30 Mei 2022.

b) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Fungsi Pengawasan DPRA yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui fasilitasi rapat-rapat, perjalanan dinas dalam rangka melakukan pengawasan ke dalam daerah dan fasilitasi perjalanan dinas dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri ke luar daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan diukur berdasarkan formulasi di bawah ini:

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang direncanakan}} \times 100 = \frac{8 \text{ Kegiatan}}{8 \text{ kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Diukur berdasarkan pelaksanaan 8 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum merupakan bidang tugas Komisi I dengan jumlah Anggota DPRA sebanyak 12 orang, dalam hal ini Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRA memfasilitasi rapat kerja Komisi I dengan Pemerintah Aceh, kegiatan kunjungan kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan pengaduan masyarakat, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Pagu anggaran murni untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp. 546.152.100,-, dan setelah perubahan menjadi Rp. 633.248.000,-, dikarenakan

penambahan kegiatan pengawasan sebanyak 1 kali menjadi 2 kali, dengan realisasi yang sudah maksimal sebesar Rp. 616.117.471,- (97,29%).

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum adalah sebagai berikut:

- Pengawasan bidang hukum terkait penegakan hukum dan pencegahan dini kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, di kabupaten Aceh Tengah dari Tanggal 5 s/d 8 Februari 2022.
- Pengawasan bidang hukum terkait perizinan HGU dan penyelesaian sengketa PT. Fajar Baizury & Brothers, di Kabuapten Nagan Raya, dari tanggal 16 s/d 19 Februari 2022.
- Pengawasan bidang hukum terkait sengketa lahan HGU Gampong Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, di Kabupaten Bireuen dari tanggal 2 s/d 5 Maret 2022.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Infrastruktur

Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan infrastruktur dilaksanakan oleh Komisi IV dengan jumlah Anggota DPRA sebanyak 16 orang. Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100%. Alokasi anggaran murni untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp. 526.327.400,-, dan setelah perubahan menjadi Rp. 718.372.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 714.656.576,- (99,48%). Kenaikan anggaran ini juga disebabkan karena adanya penambahan jumlah kegiatan pengawasan yang sebelumnya direncanakan sebanyak 1 kali menjadi 2 kali.

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pengawasan infrastruktur terkait pembangunan jalan sebagai sarana kelancaran transportasi barang dan jasa serta evaluasi pembangunan jalan lingkar, di Kota Langsa, dari tanggal 14 s/d 17 Februari 2022.
- Pengawasan infrastruktur terkait pekerjaan peningkatan jalan yang telah dilakukan bersumber dari dana APBA Tahun Anggaran 2021, di Kabupaten Nagan Raya, dari tanggal 27 s/d 31 Maret 2022.

- Pengawasan infrastruktur terkait pekerjaan peningkatan jalan yang telah dilakukan bersumber dari dana APBA Tahun Anggaran 2021, di Kabupaten Nagan Raya, dari tanggal 27 s/d 31 Maret 2022.

3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan pengawasan Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan jumlah Anggota DPRA sebanyak 11 orang. Dikarenakan belum tersedianya nomenklatur yang sesuai, maka sub kegiatan ini juga mengakomodir pelaksanaan pengawasan Komisi VI Bidang Keistimewaan dan Pendidikan dengan jumlah Anggota DPRA sebanyak 12 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tahun 2022 pagu anggaran untuk sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp. 651.681.050,- setelah perubahan menjadi Rp. 902.044.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 898.942.190,- (99,66%).

Adapun kegiatan Pengawasan yang terlaksana sebagai berikut:

- Pengawasan dan peninjauan terhadap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, di Kota Lhokseumawe, dari tanggal 10 s/d 13 Februari 2022.
- Pengawasan di bidang keistimewaan pada sektor pelayanan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Kabupaten /Kota, di Kabupaten Aceh Barat dan Kota Sululussalam, dari tanggal 8 s/d 13 Februari 2022.
- Pengawasan terkait bidang Agama dan Pendidikan terutama pada sektor pelayanan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota se-Aceh, di Kabupaten Bireuen, dari tanggal 31 Maret s/d 3 April 2022.
- Pengawasan dan peninjauan pengembangan manajemen operasional pada dayah yang mendapat bantuan anggaran APBA Tahun Anggaran 2021, di Kabupaten Aceh Timur, dari tanggal 7 s/d 30 Juli 2022.
- Pengawasan di bidang kehidupan beragama dan peninjauan pengembangan manajemen operasional pada dayah, di Kabupaten Aceh utara, dari tanggal 21 s/d 24 Juli 2022.

- Pengawasan di bidang kehidupan beragama dan peninjauan pengembangan manajemen operasional pada dayah, di Kabupaten Bireuen, dari tanggal 7 s/d 9 Juli 2022.
- Pengawasan dan peninjauan lembaga-lembaga Pendidikan I Kabupaten/Kota se-Aceh, di Kabupaten Pidie, dari tanggal 14 s/d 17 Juli 2022.
- Pengawasan dan peninjauan pengembangan manajemen operasional pada dayah yang mendapat bantuan anggaran APBA Tahun 2022, di Kabupaten Aceh Tengah, dari tanggal 7 s/d 9 Agustus 2022.
- Pengawasan bidang kesejahteraan rakyat terkait peninjauan dayah serta menghadiri undangan silaturahmi akbar peserta pemulangan dari Malaysia ke Aceh, di Kabupaten Aceh Timur, dari tanggal 2 s/d 5 September 2022.
- Pengawasan bidang kesejahteraan rakyat terkait peninjauan dayah serta menghadiri undangan peletakan batu pertama Masjid Jami, Baitunnur Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, di Kabupaten Aceh Utara, dari tanggal 1 s/d 4 September 2022.
- Pengawasan bidang kesejahteraan rakyat terkait peninjauan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota, di Kabupaten Bireuen, dari tanggal 4 s/d 6 Oktober 2022.

4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian yang pelaksanaannya berada pada Komisi IV dengan jumlah Anggota DPRD sebanyak 13 orang, dengan capaian sebesar 100%. Pagu anggaran murni tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp. 507.691.400,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 667.984.000,- dengan realisasi anggaran yang sudah maksimal sebesar Rp. 665.466.194,- (99,62%).

Adapun kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Pengawasan pengembangan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata, di Kabupaten Aceh Barat, dari tanggal 24 s/d 27 Februari 2022.
- Pengawasan pengembangan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata, di Kabupaten Aceh Utara, dari tanggal 24 s/d 27 Februari 2022.

- Pengawasan bidang ekonomi terkait peningkatan pendapatan Aceh dari sektor kendaraan bermotor ke UPTD BPKA Pidie, di Kabupaten Pidie, dari tanggal 17 s/d 20 Februari 2022.
- Pengawasan ke UPTD Badan Pengelola Keuangan Aceh terkait peningkatan pendapatan Aceh dari pajak kendaraan bermotor, di Kabupaten Aceh Timur, dari tanggal 9 s/d 12 Maret 2022.
- Pengawasan terhadap pembangunan bidang ekonomi melalui pengembangan potensi destinasi pariwisata, di Kabupaten Aceh Selatan dari tanggal 8 s/d 11 Maret 2022.
- Pengawasan terkait pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat, di Kota Langsa, dari tanggal 27 s/ d 30 Maret 2022.
- Pengawasan terkait pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat, di Kabupaten Aceh Tamiang, dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2022.
- Pengawasan terkait program peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat, di Kota Lhokseumawe, dari tanggal 3 s/d 26 Maret 2022.
- Pengawasan terkait pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat, di kota langsa, dari tanggal 27 s/d 30 maret 2022.
- Pengawasan ke UPTD Badan Pengelola Keuangan Aceh, di Kabupaten Aceh Tengah, dari tanggal 27 s/d 30 Oktober 2022.
- Pengawasan penggunaan anggaran terkait optimalisasi aset milik Pemerintah Aceh ke badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, dari tanggal 16 s/d 19 Agustus 2022.

5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

Pelaksanaan Pengawasan ini berada pada Komisi II dengan jumlah Anggota DPRA sebanyak 13 orang. Sekretariat DPRA melalui Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan telah memfasilitasi DPRA melakukan rapat-rapat dan peninjauan langsung ke lapangan dalam rangka menyahuti laporan-

laporan masyarakat dengan Pemerintah Aceh, LSM Pemerhati Lingkungan Hidup dan pihak-pihak lainnya, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun besaran pagu anggaran murni pada tahun 2022 sebesar Rp. 473.491.400,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 669.884.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 648.964.960,- (96,88%).

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Pengawasan terhadap upaya pemulihan sumber daya alam pada lahan pertanian masyarakat terkait dampak banjir, di Kabupaten Aceh Utara Dari tanggal 20 s/d 23 Januari 2022.
- Pengawasan terhadap dampak perekonomian masyarakat terkait program inti plasma pada perkebunan kelapa sawit, di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, dari Tanggal 6 s/d 11 Februari 2022.
- Pengawasan terhadap program intensifikasi pertanian guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, di Kabupaten Aceh Utara, dari tanggal 31 Maret s/d 3 April 2022.
- Pengawasan bidang Pemerintahan terkait sengketa batas percepatan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten aceh Tamiang, dari tanggal 10 s/d 13 Maret 2022.
- Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya lam pada Kawasan Ekosistem Air Tawar Mangrove (Bakau), di Kabupaten Aceh Jaya, dari tanggal 1 s/d April 2022.

6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan dimaksud dapat berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. DPRD juga melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan

tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Tahun 2021 DPRA membentuk Panitia Kerja (Panja) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Aceh Nomor 19/P-II/DPRA/2022, yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRA terhadap pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021 serta mengeluarkan beberapa rekomendasi dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada Pimpinan DPR Aceh pada tanggal 28 Desember 2022.

Besaran pagu anggaran murni untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.654.976.850,- setelah perubahan menjadi Rp. 2.987.470.640,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.404.903.274,- (80,50%).

Rapat-rapat yang terlaksana yaitu:

NO	NO/TGL SURAT	PERIHAL	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	No. 01/P-LHPBPKRI/2022, Tgl. 30 Mei 2022	Undangan rapat penyusunan agenda Panitia Kerja LHP-BPK RI T.A 2021	Kamis, 2 Juni 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana
2	No. 02/P-LHPBPKRI/VI/2022, Tgl. 2 Juni 2022	Studi banding Panja LHP-BPK RI ke Sumatera Utara, Banten dan Jawa Barat	7 s.d 10 Juni 2022	Terlaksana
3	No. 3/P-LHPBPKRI/VI/2022, Tgl. 13 Juni 2022	Undangan rapat internal terkait kunjungan kerja lapangan dan lanjutan pembahasan LHP-BPK RI T.A 2021	Selasa , 14 Juni 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
4	No. 04/P-LHPBPKRI/VI/2022, Tgl. 14 Juni 2022	Rapat koordinasi Panja DPR Aceh terhadap LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh T.A 2021 bersama Inspektorat Aceh	Kamis, 16 Juni 2022, Pukul: 09.00 - Selesai	Terlaksana
5	No. 05/P-LHPBPKRI/VI/2022, Tgl. 14 Juni 2022	Rapat koordinasi Panja DPR Aceh terhadap LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh T.A 2021 bersama Dinas Pendidikan Aceh	Selasa, 19 Juli 2022, Pukul : 14.00 - Selesai	Terlaksana
6	No. 07/P-LHPBPKRI/VII/2022, Tgl. 27 Juli 2022	Undangan rapat koordinasi Panja DPR Aceh terhadap LHP-BPK RI T.A 2021	Kamis, 28 Juli 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana

7	No. 08/P-LHPBPKRI/VII/2022, Tgl. 28 Juli 2022	Peninjauan lapangan Panja LHP-BPK RI (Tim I : Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Utara); (Tim II : Aceh Jaya dan Aceh Selatan)	1 s.d 5 Agustus 2022	Terlaksana
8	Tgl. 09/P-LHPBPKRI/IX/2022, Tgl. 09 Sept. 2022	Rapat koordinasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh T.A 2021	Senin, 12 Sept 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana
9	Tgl. 10/P-LHPBPKRI/VIII/2022, Tgl. 15 Agustus 2022	Rapat evaluasi terhadap pengembalian temuan SKPA pada LHP-BPK RI T.A 2021	Kamis, 18 Agust 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana
10	No. 11/P-LHPBPKRI/VIII/2022, Tgl. 31 Agustus 2022	Peninjauan lapangan ke Kota Langsa	1 s.d 4 September 2022	Terlaksana
11	No. 12/P-LHPBPKRI/VIII/2022, Tgl. 16 Sept 2022	Kunjungan kerja Panja LHP-BPK RI ke Jakarta dan Semarang	25 s.d 30 September 2022	Terlaksana
12	No. 13/P-LHPBPKRI/IX/2022, Tgl. 17 Oktober 2022	Rapat koordinasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh T.A 2021	Rabu, 19 Okt 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana
13	No. 14/P-LHPBPKRI/X/2022, Tgl. 17 Oktober 2022	Rapat koodinasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh T.A 2021 dengan Asisten Administrasi Umum Setda Aceh; Dinas Perkim; Dinas PUPR; Dinsos; Inspektur Aceh; BPKA; BPPA	Rabu, 19 Okt 2022, Pukul : 10.00 - Selesai	Terlaksana
14	No. 15/P-LHPBPKRI/X/2022, Tgl. 19 Oktober 2022	Konsultasi dengan DPR RI di Jakarta	20 s.d 23 Oktober 2022	Terlaksana
15	No. 16/P-LHPBPKRI/X/2022, Tgl. 26 Oktober 2022	Koordinasi dan konsultasi ke Baznas Pusat	1 s.d 5 November 2022	Terlaksana

Adapun kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

- Melakukan peninjauan lapangan terkait temuan LHP-BPK RI Tahun Anggaran 2021, di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, dari tanggal 1 s/d 5 Agustus 2022
- Melakukan peninjauan lapangan terkait temuan LHP-BPK RI Tahun Anggaran 2021, di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Selatan, dari tanggal 1 s/d 5 Agustus 2022
- Melakukan peninjauan lapangan terkait temuan LHP-BPK RI Tahun Anggaran 2021, di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, dari tanggal 1 s/d 5 Agustus 2022
- Melakukan peninjauan lapangan terkait temuan LHP-BPK RI, di Kabupaten Aceh Utara, dari tanggal 10 s/d 13 September 2022
- Melakukan peninjauan lapangan terkait temuan LHP-BPK RI atas Lapointah Aceh Tahun Anggaran 2021, di Kota Langsa, dari tanggal 1 s/d 4 September 2022

Dalam kegiatan pengawasan ini juga dilaksanakan koordinasi dan konsultasi yaitu:

- Melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Panja terhadap LHP-BPK ri atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021, di Jakarta, dari tanggal 24 s/d 27 Agustus 2022.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait LHP-BPK RI T.A 2021 ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, di Sumatera Utara, Dari Tanggal 21 s/d 24 Agustus 2022.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi Panja LHP-BPK RI DPR Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 ke DPRD Provinsi Sumatera Utara,serta pertemuan dengan tokoh-tokoh Aceh, di Sumatera Utara, dari tanggal 20 s/d 22 Agustus 2022.
- Melakukan konsultasi dan koordinasike DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait LHP-BPK RI Tahun 2021, di Jakarta, dari tanggal 13 s/d 17 September 2022.

- Melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait penyusunan rekomendasi Panja terhadap LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 serta koordinasi ke Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Aceh di Jakarta terkait peninjauan aset kantor serta pengelolaan Mes Aceh, di Jakarta dan Jawa Tengah, dari tanggal 25 s/d 30 September 2022.
- Melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait pencermatan LHP-BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021, di Jakarta, dari tanggal 20 s/d 23 Oktober 2022.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi Panja LHP-BPK RI DPR Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Sumatera Utara, dari tanggal 18 s/d 21 Agustus 2022.

7. Pengawasan Penggunaan Anggaran

Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan suatu bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana. Sebagai alat controlling, pengawasan anggaran bertugas untuk mengevaluasi rencana anggaran dan rencana kerja dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan kerja dengan rencana anggarannya, serta melakukan tindakan perbaikan apabila memang diperlukan dan jika memang terdapat kegiatan menyimpang yang merugikan. Fasilitasi kegiatan ini terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tahun Anggaran 2022 sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran mendapat alokasi pagu anggaran murni sebesar Rp1.681.441.500,-, dan setelah perubahan menjadi Rp1.549.518.000,- dengan realisasi yang sudah maksimal sebesar Rp1.527.877.257,- (98,60%)

Adapun kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang terlaksana sebagai berikut:

- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan I, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan II, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan III, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan IV, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan V, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan VI, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan VII, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan VIII, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan IX, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Daerah Pemilihan X, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.

- Melakukan kunjungan kerja lapangan terkait Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah, dari tanggal 21 s/d 26 Juni 2022.

8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan oleh Gubernur Aceh yang merupakan bentuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang menggambarkan indikator kinerja, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kebijakan dalam pemerintahan serta on the tract (di trek peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, dan kegiatan ini terlaksana sesuai dengan yang direncanakan (100%).

Tahun Anggaran 2022 sub kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 588.510.100,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 463.139.943,- dengan realisasi Rp463.139.943,- (100%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

NO.	NO/TGL SURAT	PERIHAL	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	04/P-LKPJ/IV/2022, TGL 25 April 2022	Rapat Pembahasan Lanjutan dan Bedah Buku LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Senin, 25 April 2022, Pukul 11.00-Selesai	Terlaksana
2	05/P-LKPJ/V/2022, TGL 09 Mei 2022	Rapat Lanjutan Pembahasan LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Rabu, 11 Mei 2022, Pukul 10.00-Selesai	Terlaksana

3	07/P-LKPJ/V/2022, TGL 12 Mei 2022	Rapat Penjelasan LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 terkait Proyek Multiyears	Rabu, 18 Mei 2022, Pukul 14.00-Selesai	Tidak terlaksana
4	08/P-LKPJ/V/2022, TGL.17 MEI 2022	Penundaan Rapat LKPJ terkait Proyek Multiyears		-
5	11/P-LKPJ/V/2022, TGL.26 MEI 2022	Rapat Finalisasi Penyusunan Rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Sabtu, 28 Mei 2022, Pukul 14.00-Selesai	Terlaksana
6	13/P-LKPJ/V/2022, TGL.27 MEI 2022	Rapat Lanjutan Finalisasi Penyusunan Rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Senin, 30 Mei 2022, Pukul 16.00-Selesai	Terlaksana
7	14/P-LKPJ/V/2022, TGL.30 MEI 2022	Rapat Lanjutan Finalisasi Penyusunan Rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Selasa, 31 Mei 2022, Pukul 11.00-Selesai	Terlaksana

Adapun Kegiatan Kunjungan Lapangan yang terlaksana yaitu:

- Kunjungan lapangan terkait penyempurnaan penyusunan rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 ke Dapil II, II, IV dan VIII, pada tanggal 11 Mei 2022.
- Kunjungan lapangan terkait penyempurnaan penyusunan rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 ke Dapil I, V, VI, VII pada tanggal 11 Mei 2022.
- Sinkronisasi data dan realisasi pekerjaan SKPA dalam LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 27-30 Mei 2022.

c) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan DPRA dalam upaya menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat.

Formulasi pengukuran capaian kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang direncanakan}} \\
 &\times 100\% = \frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ kegiatan}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%, sama seperti tahun sebelumnya.

Kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan 3 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam Pasal 129 Ayat (1) dan (4) disebutkan bahwa Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPR Aceh ke dalam daerah meliputi kunjungan kerja Komisi-komisi dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan untuk menerima, menampung, menyerap, serta menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Jumlah anggaran murni pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.923.358.175,- dan setelah perubahan menjadi Rp12.322.544.000,- dengan realisasi sebesar Rp12.104.303.481,- (98,23%). Adapun kegiatan kunjungan kerja yang terlaksana, yaitu :

Komisi I

- Melakukan kunjungan lapangan terkait dengan sengketa lahan masyarakat dalam kawasan Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dengan PT. Aloer Timur Afdelling IV dimana sengketa tersebut telah menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat dan Muspika Peunaron belum bisa meredam dan menyelesaikan sengketa tersebut secara komprehensif karena keterbatasan wewenang, dan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi sengketa sekaligus bertemu langsung dengan warga guna mengumpulkan

data dan fakta lapangan yang nantinya akan dibawa dalam rapat komprehensif bersama pihak terkait dalam penyelesaian semua sengketa lahan dengan perusahaan HGU/HPD/HTI di Aceh.

- Melakukan kunjungan lapangan terkait dengan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara HGU PT. Setya Agung Dengan Gampong Kilometer VIII berdasarkan Surat masuk dari Geuchik Gampong Kilometer VIII Nomor: 145/149/2021 tanggal 21 September 2021 dan Surat dari Ketua DPRK Aceh Utara Nomor: 592/711/2021 tanggal 15 November 2021 tentang hal Rekomendasi, dimana dalam surat disebutkan agar DPR Aceh dapat segera menyelesaikan sengketa lahan antar Warga dengan HGU PT. Setya Agung.
- Kunjungan lapangan terkait dengan perselisihan batas antar Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Nagan Raya di lokasi objek vital Nasional (PLTU) telah membuat iklim investasi terpengaruh dan sulit untuk berkembang karena kedua kabupaten saling mengklaim.
- Kunjungan lapangan khususnya keberadaan pulau-pulau terluar di Kabupaten Simeulue dan juga penyelesaian pengambilalihan beberapa pulau yang dimasukkan dalam kawasan wilayah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara secara sepihak.
- Kunjungan Kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang terkait dengan PT. Semadam menolak untuk memberikan lokasi Pembangunan Pos Pemeriksaan Hasil Hutan KPH Wilayah III Aceh dan menyarankan mengambil lahan PT. P.D Pati untuk Memastikan Agar Pembangunan Pos Pemeriksaan Hasil Hutan KPH Wilayah III Aceh Sebagai Wujud Dari Peningkatan Layanan Pemerintah Di Sektor Publik Terlaksana.
- Kunjungan Kerja Terkait Dengan Perizinan 400 Ha Lahan Perkebunan PT. Fajar Baizury & Brother's Dalam Kawasan Gampong Cot Mee perihal Tidak Diberikan Izin Perpanjangan HGU dan Penyelesaian Sengketa PT. Fajar Baizury & Brother's. Dimana Perangkat Gampong sudah berulang kali menyurati Pemerintah Kabupaten Nagan Raya namun belum ada tindak lanjut.

- Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bireuen Terkait Dengan Perizinan Lahan Perkebunan HGU PT. Syaukath Sejahtera dalam kawasan Gampong Krueng Simpo.
- Komisi I DPR Aceh juga melakukan kunjungan kerja ke DPR Kabupaten Aceh Tamiang Percepatan Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) dan surat Gubernur Aceh Nomor 126/ tanggal 18 Oktober 2021 tentang hal Percepatan Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk Memastikan Realisasi Titik Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) serta Menghimpun Informasi Persoalan Yang Telah Menimbulkan Korban Penganiayaan Orang dan Pengrusakan Harta Benda.
- kunjungan kerja terkait dengan sengketa lahan HGU dan melakukan Klarifikasi dan Pengumpulan Data Peta Luas Areal HGU dan Dokumen Perizinan HGU di seluruh Kabupaten Aceh Utara.
- Komisi I DPR Aceh juga telah melakukan beberapa kali kunjungan lapangan terkait dengan Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah, Bireuen, Bener Meriah dan Nagan Raya.
- kunjungan kerja ke beberapa Kabupaten/Kota di Aceh terkait dengan Peraturan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024.

Komisi II

- Melakukan Peninjauan Terkait Aspirasi Masyarakat Yang Disampaikan Oleh CV Sari Rasa Berkenaan dengan Intruksi Gubernur Aceh Tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Ke Luar Aceh 12 s.d 15 Januari 2022 ke Aceh Tengah.
- Melakukan Peninjauan Terkait Eksplorasi Emas Dan Mineral di Linge Kabupaten Aceh Tengah 24 s.d 27 Februari 2022.
- Melakukan Peninjauan Terkait Ketersediaan dan Distribusi Minyak Goreng Bersubsidi ke Aceh Utara 3 s.d 6 Maret 2022.
- Melakukan Peninjauan Terkait Moratorium Penjualan Getah Pinus Ke Luar Wilayah Aceh ke Kabupaten Aceh Tenggara 3 s.d 6 Maret 2022.

- Melakukan Peninjauan Terhadap Usaha Penyulingan Serai Wangi Ke Kabupaten Aceh Tengah 23 s.d 26 Maret 2022.
- Melakukan peninjauan terhadap ketersediaan sembako ke Kota Langsa pada tanggal 25 s.d 27 April 2022.
- Melakukan peninjauan terhadap laporan masyarakat terkait aktifitas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Delima Makmur di Aceh Singkil pada tanggal 5 s.d 8 Juni 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pemanfaatan SDA pada kawasan ekosistem air tawar mangrove (bakau) Di Kota Langsa pada tanggal 9 s.d 12 Juni 2022.
- Melakukan peninjauan lapangan terkait bidang pemberdayaan koperasi masyarakat pada tanggal 27 s.d 30 Juli 2022.
- Melakukan peninjauan lapangan terkait Monev kasus PMK di Kabupaten Aceh Utara 24-27 Agustus.
- Peninjauan Lapangan terkait keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Tamiang 23-26 September.
- Peninjauan ke sentra industri rumah tangga terkait perkembangan home industri Bireuen 4-6 Oktober.
- Peninjauan lapangan terkait izin Explorasi Tambang PT. Linge Mineral Resources Kabupaten Aceh Tengah 20-23 Oktober.
- Peninjauan lapangan terkait pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar 27-30 Oktober.
- Kunjungan ke lapangan terkait Ingub tentang larangan penjualan getah pinus keluar Aceh ke Kabupaten Gayo Lues 3-6 November.
- Melakukan peninjauan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terkait bidang kelautan dan perikanan Aceh 9-11 November.
- Kunjungan lapangan terkait izin pengelolaan Hutan Mangrove 17-20 November.

Komisi III

- Melakukan peninjauan terkait operasional PT. Pertamina EP Asset 1 Rantau Field 20 s/d 23 Januari 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait monitoring terhadap realisasi program kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh

(DOKA) Tahun Anggaran 2022 ke Kabupaten Aceh Selatan 22 s/d 25 Maret 2022.

- Monitoring dan Evaluasi ke PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang 23 s/d 26 Maret 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang PT. Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Barat 31 Maret s/d 03 April 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang PT. Bank Aceh Syariah Kabupaten Pidie 31 Maret s/d 03 April 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pengelolaan potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya 8 s.d 11 April 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pengelolaan potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Bireun 8 s.d 11 April 2022.
- Melakukan peninjauan dan evaluasi terkait kegiatan pengembangan sektor pariwisata di Kota Langsa 14 s/d 17 April 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Timur 16 s/d 19 Juni 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait program dan kegiatan pembangunan khususnya disektor ekonomi dan pariwisata yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Kabupaten Pidie 21 s/d 24 Juli 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait monitoring terhadap pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya 11 s/d 14 Agustus 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait revitalisasi kinerja dan pelayanan ke UPTD Badan Pengelola Keuangan Aceh di Kabupaten Aceh Jaya 14 s/d 17 Agustus 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Bireuen 18 s/d 21 Agustus 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait monitoring terhadap pengembangan potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Aceh Timur 23 s/d 26 Agustus 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait monitoring dan evaluasi ke UPTD Wilayah XII Badan Pengelola Keuangan Aceh di Kabupaten Aceh Barat 24 s/d 27 Agustus 2022.

- Melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pidie Jaya terkait pengembangan potensi destinasi pariwisata 31 Agustus s/d 3 September 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait monitoring dan evaluasi ke UPTD Badan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Aceh Selatan 8 s/d 11 September 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Kota Sabang 11 s/d 14 September 2022.
- Menghadiri undangan Walikota Subulussalam Provinsi Aceh pada acara "Event Kemah Durian (Muhun ala WKS) Season 3" di Agrowisata Kebun Durian Jontor serta melakukan peninjauan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Subulussalam 16 s/d 19 September 2022.
- Melakukan peninjauan terkait kondisi objek hibah Barang Milik Aceh (BMA) di Kabupaten Aceh Jaya 23 s/d 26 September 2022.
- Melakukan peninjauan lokasi realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan potensi pariwisata lokal pada Dinas Pariwisata Aceh di Daerah Meulaboh 23 s/d 26 September 2022.
- Melakukan kunjungan kerja dan peninjauan terkait pengembangan potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Nagan Raya 28 September s/d 1 Oktober 2022.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOKA) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Aceh Tengah 28 September s/d 1 Oktober 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait monitoring dan evaluasi ke UPTD Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Wilayah XIII Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 30 November s/d 3 Desember 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait monitoring dan evaluasi ke UPTD Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Wilayah IV Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 30 November s/d 3 Desember 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait monitoring dan evaluasi ke UPTD Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Kota Sabang pada tanggal 30 November s/d 3 Desember 2022.

- Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Aceh Syariah terkait peningkatan pelayanan transaksi keuangan masyarakat, realisasi pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 6 s/d 9 Desember 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Aceh Syariah terkait peningkatan pelayanan transaksi keuangan masyarakat, realisasi pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 6 s/d 9 Desember 2022.
- Melakukan kunjungan kerja terkait realisasi program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 14 s/d 17 Desember 2022.

Komisi IV

- Melakukan kunjungan kerja, terkait permohonan pembangunan rumah layak huni di Kab. Bireuen 13 - 16 Jan 2022
- Melakukan kunjungan kerja terkait penanganan pembangunan pengaman tebing sungai di kab. Aceh Utara 20 s.d 23 Januari 2022
- Melakukan kunjungan kerja terkait Perubahan Peningkatan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Kabupaten Aceh Timur 8 s.d 12Februari 2022.
- Pembangunan Jalan sebagai sarana kelancaran transportasi dan Evaluasi Pembangunan Jalan Lingkar Kota Langsa 14 s.d 18 Februari 2022.
- Permohonan Perubahan Peningkatan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Kota Lhokseumase dan Langsa 22 s.d 27 Februari 2022.
- Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Pidie 24 s.d 27 Februari 2022.
- Melakukan Kunker terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues di Aceh Timur ST Tanggal 02 - 06 Maret 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pekerjaan peningkatan jalan Trumon - Batas Singkil di Kab. Aceh Tenggara Tanggal 09 - 13 Maret 2022.

- Menghadiri undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Langsa Tahun Perencanaan 2023 di Langsa Tanggal 16 - 20 Maret 2022.
- Melakukan kunker peningkatan pembangunan jalan Jantho-Batas-Aceh Jaya di Aceh Jaya Tanggal 17 - 20 Maret 2022.
- melakukan kunker terkait pembangunan jalan Penghubung jalan penghubung antar Kabupaten/ Kota Guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Bireuen Tanggal 01 - 03 April 2022.
- Melakukan kunker terkait penanganan kondisi jalan penghubung guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Gayo Lues Tgl 08 - 11 April 2022.
- Melakukan peninjauan lapangan terkait pengembangan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana APBA TA.2021 di Langsa tanggal 14 - 17 April 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pembangunan kegiatan pengendalian banjir guna menanggulangi musibah banjir periodik Tanggal 25 - 27 April 2022.
- Melakukan kunjungan lapangan terkait pembangunan Jetty di wilayah pesisir Aceh Barat Tanggal 15 - 18 Mei 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pembangunan Jetty pemecah ombak (break Water) untuk Mengantisipasi banjir Rob di Lhokseumawe Tanggal 03 - 05 Juni 2022.
- Melakukan kunker terkait peningkatan Prasarana. Sarana dan utilitas umum (PSU) Permukiman Pulau Pusong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Tanggal 15 - 19 Juni 2022.
- Melakukan kunker ke A. Timur terkait peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di A. Timur Tanggal 06 - 09 Juli 2022.
- Melakukan kunker ke Gayo Lues melakukan kunker terkait rehabilitasi jaringan irigasi D. I Weih Tilis Kab. Gayo Lues Tgl 21 - 24 Juli 2022.
- Melakukan kunker ke Bireuen dan Aceh Barat terkait Peningkatan Jaringan Irigasi tanggal 27 s.d 30 Juli 2022.
- Melakukan kunker ke Aceh Tenggara terkait Penanganan abrasi dan normalisasi Sungai Lawe Kinga dan Sungai Alas tanggal 2 s.d 5 Agustus 2022.

- Melakukan kunker ke Aceh Aceh Utara terkait Penataan kawasan Permukiman Kumuh tanggal 4 s.d 7 Agustus 2022.
- Melakukan kunker ke Aceh Tengah terkait Pembangunan Rumah Layak Huni dan penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah tanggal 11 s.d 14 Agustus 2022.
- Koordinasi ke Provinsi Sumatera Utara terkait Pembangunan Jalan melalui skema pendanaan *Multy Years* ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tanggal 18 s.d 21 Agustus 2022.
- Melakukan Monitoring ke Lhokseumawe terkait Penanganan Jalan tanggal 1 s.d 4 September 2022.
- Melakukan kunker ke Pidie Jaya dan Aceh Timur terkait Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman dan progres Pembangunan Masjid bersumber APBA 2022 tanggal 2 s.d 11 September 2022.
- Melakukan kunker ke Aceh Tenggara terkait Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman dan progres Pembangunan Rumah Layak Huni bersumber APBA 2022 tanggal 13 s.d 16 September 2022.
- Melakukan kunker ke Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya terkait Supervisi Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak (*Multy Years Contract*) di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 pada pekerjaan: Peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (Segmen 1 dan Segmen 2), dan Peningkatan Jalan Batas Gayo Lues – Babah Roet tanggal 25 s.d 30 September 2022.
- Melakukan kunker ke Bireuen dan Aceh Timur terkait Progres Pembangunan Rumah Layak Huni 1 ss.d 3 Oktober 2022.
- Melakukan kunker ke Pidie terkait Pemeliharaan Jalan Berkala Jalan Lingkar Kota Sigli dan Jalan Peukan Pidie – Jabal Ghafur – Ujung Rimba – Bili Aron tanggal 4 s.d Oktober 2022.
- Melakukan kunker ke Aceh Tengah terkait Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan tanggal 20 s.d 23 Oktober 2022.
- Melakukan kunker ke Nagan Raya terkait Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Gampong tentang Literasi dan

Pemanfaatan Sosial Media untuk Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) pada Tanggal 11 s.d 14 November 2022.

- Melakukan kunker ke Lhokseumawe dan Aceh Utara Usulan Peningkatan Status Jalan sebagai Jalan Provinsi tanggal 16 s.d 20 November 2022.

Komisi V

- Peninjauan Sentra Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Aceh Tengah, agar pemberian bantuan modal usaha yang diberikan tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang optimal terhitung sejak tanggal 17 Januari sampai dengan 20 Januari 2022.
- Melakukan Peninjauan terkait program Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur Terhitung sejak tanggal 02 Maret sampai dengan 05 Maret 2022.
- Peninjauan lapangan terkait Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Kesempatan Kerja serta penguatan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Timur terhitung sejak tanggal 08 Maret sampai dengan 11 Maret 2022 dan tanggal 10 Maret – 13 Maret 2022.
- Peninjauan terkait Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat di Kota Lhokseumawe Terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 26 Maret 2022.
- Peninjauan daerah banjir dan menyalurkan bantuan berupa sembako dan sandang ke daerah yang terdampak banjir di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tamiang, terhitung sejak tanggal 24 Januari sampai dengan 27 Januari 2022 dan 10 Februari sampai dengan 13 Februari 2022.
- Peninjauan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Kabupaten Aceh Timur tentang belum optimalnya pelayanan kesehatan pada Rumah sakit pada hari libur kerja di Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tengah, Aceh Timur terhitung sejak tanggal 21 Januari sampai dengan 24 Januari 2022, 06 Februari sampai dengan 09 Februari 2022, 16 Februari sampai dengan 19 Februari 2022.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terkait lahan penduduk transmigrasi lokal terhitung sejak tanggal 13 sampai dengan 16 Februari 2022.

- Menghadiri Undangan Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh mewakili Ketua DPR Aceh dengan agenda Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) XIV Tahun 2022 Pidie tanggal 29 Januari 2022.
- Menghadiri Undangan Peserta Muswil VI DPW PPNI Aceh, acara pembukaan Muswil VI DPW PPNI Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2022 bertempat di Hotel Grand Bayu Hill Kabupaten Aceh Tengah.
- Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab/ Kota tentang tentang Program Peningkatan Layanan Kesehatan tanggal 8 s.d 11 April 2022.
- Melakukan Peninjauan RSUD Kab/ Kota tanggal 13 s.d 16 Mei 2022
- Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab/ Kota tentang tentang Program Peningkatan Layanan Kesehatan tanggal 7 s.d 10 Juli 2022.
- Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab/ Kota tentang Kesejahteraan Sosial tanggal 15 s.d 18 Juli 2022.
- Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab/ Kota tentang Bidang Olahraga tanggal 4-7 Agustus 2022.
- Melakukan Kunjungan Kerja tentang data PBI- JK dan JKA tanggal 19 s.d 22 September 2022.
- Melakukan Peninjauan Program Pemberdayaan Masyarakat Gampong ke Kab/ Kota tanggal 29 Nov s.d 2 Des 2022.
- Melakukan Peninjauan Persiapan Pora Pidie pada tanggal 17-20 Nov 2022.

Komisi VI

- Melakukan Peninjauan & menyerahkan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor di Aceh Utara tanggal 12 - 15 Jan 2022.
- Melakukan peninjauan lembaga lembaga pendidikan pasca banjir di Kabupaten Aceh Utara Tanggal 19 - 22 Jan 2022.
- Melakukan peninjauan terkait pengembangan manajemen operasional pada dayah di provinsi aceh kab. Aceh Utara dan Aceh Tengah.
- Melakukan peninjauan terkait pengembangan manajemen operasional pada dayah di Provinsi Aceh kota Sabang dan Kabupaten Pidie.
- Melakukan peninjauan pengembangan manajemen operasional pada dayah serta pertemuan dengan para da'i perbatasan di kota Subulussalam.

- Melakukan konsultasi ke kementrian agama R.I terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedeqah dan harta agama lainnya di provinsi serta peninjauan TMII di Jakarta.
- Melakukan peninjuan lembaga-lembaga pendidikan di kabupaten/kota se aceh di kab. Bener meriah dan kab. Aceh tenggara.
- Menghadiri undangan Upacara pembukaan musabaqah tunas ramadhan (MTR) XXI di Kabupaten Bireun.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor cabang Dinas pendidikan di Kota Langsa dan kunjungan ke MPU Kab. Bener Meriah Tanggal 14 - 19 Juni 2022.
- Permintaan narasumber rakor lembaga keistimewaan kab/kota se-aceh di Takengon.
- Pembukaan MTQ di Kab. Bener Meriah.
- Kunjungan Kerja Ke Bieuren dan Aceh Tengah.
- Menghadiri Undangan Tgk H. Muhammad Yusuf A Wahab di Aceh Timur.
- Undangan Pelatan Batu Pertama di Dayah Kabupaten Aceh Utara.
- Undangan dalam Rangka Upacara Hari Pramuka ke 61 di Kabupaten Aceh Tengah.
- Undangan Pembukaan POMDA Aceh tahun 2022 di Kota Langsa.
- Undangan pembukaan festival Dikee di Aceh Timur.
- Menghadiri Undangan dari Dayah Bustanul Huda Paya Pasi di Kabupaten Aceh Timur.
- koordinasi Pengembangan manajemen operasional pada dayah yang mendapat bantuan anggaran APBA tahun 2021 di Kabupaten Aceh Timur.
- koordinasi Pengembangan manajemen operasional pada Dayah yang mendapat bantuan anggaran APBA tahun 2021 di Kabupaten Aceh Tengah.
- Peninjauan situs sejarah dan konsultasi bersama Dinas Pariwisata di Kabupaten Aceh tengah.
- Peninjauan situs sejarah dan konsultasi bersama Dinas Pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah.
- Konsultasi dan Peninjauan Pelayanan Pendidikan di Lembaga-Lembaga Pendidikan yang ada di Kabupaten Bieureun.

- Konsultasi dan Peninjauan Pelayanan Pendidikan di Lembaga-Lembaga Pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
- Koordinasi serta meninjau pengembangan manajemen operasional pada Dayah yang mendapatkan bantuan anggaran APBA tahun 2022 di Aceh Timur.
- Konsultasi dan Peninjauan Lembaga-Lembaga Pendidikan di Kota Langsa.
- Kunjungan Kerja ke Dayah di Aceh Tengah.
- Mengahdiri HUT Bener Meriah.
- Undangan dalam rangka MUSDA KNPI di Aceh Tamiang.

2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, menyebutkan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam e-planning bagi daerah yang telah memiliki SIPD. Pada tahun 2022 Sekretariat DPRA melalui Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Subbagian Kerjasama dan Aspirasi telah memfasilitasi proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPR Aceh sesuai dengan nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, selanjutnya disampaikan ke Bappeda Aceh untuk dilakukan Verifikasi dan penelaahan terhadap Pokok-pokok Pikiran dari Pimpinan dan Anggota DPRA. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/4175 tanggal 14 Maret 2022 Perihal Penginputan Pokok-pokok Pikiran DPRA Tahun 2023 pada Aplikasi SIPD, Penginputan pokok-pokok pikiran Pimpinan dan Anggota DPRA ke dalam aplikasi SIPD dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 23 Maret 2022 dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun jumlah anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.854.026,-, dengan realisasi sebesar Rp. 51.167.505,- (90%).

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses



Pelaksanaan Kegiatan Reses I yang dilaksanakan oleh Bapak
Drs. H. Abdurrahman Ahmad

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam Pasal 87 Ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa tahun sidang DPRD dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan yang

meliputi masa sidang dan masa reses. Reses adalah salah satu kegiatan strategis dan penting, karena dengan adanya pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk mengunjungi konstituennya didapil masing-masing untuk menyampaikan hasil kerjanya, memantau pembangunan, melihat permasalahan didapil, melakukan pengawasan implementasi pembangunan dan kebijakan dan menjaring aspirasi konstituen. Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRA Tahun 2022 dilakukan selama 8 (delapan) hari dan telah difasilitasi serta terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan persentase capaian sebesar 100%, sama seperti tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dibawah ini:

1. Reses I dilaksanakan pada tanggal 25 Januari s.d 1 Februari 2022,
2. Reses II dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 26 Mei 2022,
3. Reses III dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 14 Oktober 2022.

Dari hasil pelaksanaan reses tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRA menyampaikan usulan masyarakat untuk direkapitulasi dan disampaikan kepada Gubernur Aceh dalam Rapat Paripurna DPRA agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh.

Adapun jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 31.788.471.665,- setelah perubahan menjadi Rp. 28.010.984.741,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.826.732.770,- (99,34%). Sisa anggaran dikarenakan adanya 2 (dua) anggota DPRA yang tidak melaksanakan Reses I Tahun 2022.



Pelaksanaan Kegiatan Reses III yang dilaksanakan oleh Bapak Teuku Irwan Djohan, ST

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator **“Persentase kegiatan DPRA yang terfasilitasi”** dapat dicapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu (89%), maka terjadi kenaikan sebesar 12,4%.

Adapun fasilitasi dan dukungan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA untuk mendukung tugas dan fungsi DPRA melalui pelaksanaan sub Kegiatan:

a. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik tahun 2022 direncanakan sebanyak 5 Naskah dan terealisasi sebanyak 4 Naskah (1 Naskah Perubahan Rancangan UUPA dan 3 Naskah Rancangan Qanun Inisiatif DPRA), dengan persentase capaian sebesar 80%. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 650.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 550.000.000,- (84,62%).

b. Bimbingan Teknis DPRD

Kegiatan Bimtek ini telah dilaksanakan oleh beberapa Pimpinan dan Anggota DPRD baik di dalam daerah maupun luar daerah, yang pelaksanaannya direncanakan sebanyak 1 kali dalam daerah dan 2 kali luar daerah, dengan capaian kinerja sebesar 83,5%.

- Fraksi Partai Aceh sebanyak 19 orang dengan intensitas pelaksanaan 3-4 kali,
- Fraksi Partai Demokrat sebanyak 10 orang, 1-3 kali,
- Fraksi Partai Golongan Karya sebanyak 9 orang, 2-3 kali,
- Fraksi Partai Gerindra sebanyak 7 orang, 2 kali,
- Fraksi Partai Nanggore Aceh sebanyak 6 orang, 2 kali,
- Fraksi Partai Amanat Nasional sebanyak 6 orang, 2 kali,
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 8 orang, 1-2 kali
- Fraksi Partai PKB sebanyak 3 orang, 1 kali
- Fraksi Partai Hanura sebanyak 1 orang, 2 kali
- Fraksi Partai PDI-P sebanyak 2 orang, 2 kali

Alokasi pagu anggaran murni untuk kegiatan ini Rp. 4.093.256.000,- dan mengalami pengurangan setelah perubahan menjadi Rp. 2.904.529.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.425.186.035 (83,50%). Adanya beberapa Anggota DPRD yang hanya melakukan Bimtek sebanyak 1-2 kali saja, mengakibatkan serapan anggaran menjadi kurang maksimal.

c. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan dilaksanakan dengan mempublikasikan segala kegiatan/aktifitas pimpinan dan anggota DPRD pada tahun 2022 melalui media elektronik, media cetak, online dan parlementaria. Capaian kinerja kegiatan ini melebihi target yang direncanakan yaitu sebesar 119%, hal ini dikarenakan Jumlah publikasi media cetak, elektronik dan online yang dipublis sebanyak 359 kegiatan dari 300 yang direncanakan.

Pagu anggaran murni yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 2.968.000.000,-, dan bertambah menjadi Rp. 4.937.000.000,- dengan serapan anggaran yang sudah maksimal yaitu sebesar Rp.

4.877.913.890,- (98,80%). Penyesuaian anggaran yang sangat signifikan ini dikarenakan adanya penambahan beberapa Jasa iklan/ucapan selamat/belasungkawa dan biaya Parlementaria DPRA untuk mempublikasikan kegiatan DPRA.

d. Penyediaan Kelompok Pakar Ahli

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017, Jumlah maksimal tenaga ahli yang disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA yang melekat pada Pimpinan DPRA, Komisi-komisi, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya adalah sebanyak 3 orang untuk setiap AKD, sehingga total tenaga ahli yang disediakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 42 orang. Dikarenakan tidak semua AKD merekrut 3 orang tenaga ahli sekaligus dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, jumlah tenaga ahli yang digunakan tahun 2022 hanya sebanyak 37 orang (88%). Tidak tercapainya target tersebut mengakibatkan serapan anggaran menjadi tidak maksimal hanya sebesar 78.37% (Rp. 1.580.000.000) dari yang direncanakan Rp.2.016.000.000,-.

e. Penyediaan Tenaga Ahli

Penyediaan tenaga ahli fraksi yang tersedia pada tahun 2022 (sesuai PP No. 18 Tahun 2017) adalah sebanyak 9 orang dan terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%). Alokasi anggaran yang disediakan untuk tenaga ahli ini adalah sebesar Rp. 432.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 (92,59%).

f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat ini dilaksanakan dengan menyediakan honorarium terhadap kegiatan keprotokolan, pengelolaan website, media sosial, dan penyediaan majalah DPRA dengan capaian kinerja sebesar 95%. Alokasi pagu anggaran murni untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 1.573.282.400,-, dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 1.638.243.400,-, dengan realisasi Rp. 1.526.364.700 (93,17%). Penambahan anggaran pada kegiatan ini dialokasikan untuk mencetak buku profil Pimpinan dan Anggota DPRA yang sebelumnya tidak dianggarkan.

g. Penyusunan Program Kerja DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu penyusunan RKT DPRA dan Kunjungan Kerja luar negeri, dengan capaian kinerja sebesar 65%. Alokasi pagu anggaran murni untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.973.456.052,- dan terjadi pengurangan anggaran yang sangat signifikan setelah perubahan menjadi Rp. 1.735.350.802,-, hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran perjalanan dinas luar negeri, yang semula dianggarkan untuk semua Anggota DPRA (81 orang) menjadi 10 orang.

Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

➤ Kegiatan Penyusunan Dokumen RKT DPRA

Kegiatan penyusunan RKT DPRA 2022 dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) penyusunan RKT yang ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRA Nomor 23/P-I/DPRA/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022. Rencana Kerja Tahunan DPRA Tahun 2022 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRA tanggal 29 Desember 2021 melalui Keputusan DPRA Nomor 15/DPRA/2021 tanggal 29 Desember 2021 (tercapai 100%).

➤ Kunjungan kerja Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRA

Kunjungan kerja luar negeri direncanakan pada pagu murni sebanyak 1 kali untuk 81 Anggota DPRA, namun karena masih adanya Pandemi Covid-19 yang melanda di beberapa negara, dan Kementerian Dalam Negeri RI serta Kementerian Sekretariat Negara tidak mengeluarkan izin untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri, maka pada perubahan anggaran, jumlah Anggota disesuaikan kembali menjadi 10 orang, dan yang melaksanakan hanya 3 orang (30%). Dengan rendahnya capaian kinerja kegiatan ini menyebabkan serapan anggaran menjadi rendah.

Adapun Pimpinan dan Anggota DPRA yang melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri dengan ke Rhode island amerika serikat guna memenuhi undangan president university of rhode island, untuk memastikan peran legislatif terkait dengan pembangunan strategis Aceh di bidang pendidikan sekaligus mengawasi kegiatan kerja sama pemerintah daerah dengan

university rhode island, dari tanggal 16 s.d 22 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

1. H. Dalimi, SE, Ak, CA,
2. Hendra Budian, SH,
3. Ir. H. Alaidin Abu Abbas, MM

h. Pengawasan Kode Etik DPRD

Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, keberadaan lembaga ini untuk menjawab kebutuhan arus informasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini juga sangat penting dan strategis guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Lembaga ini merupakan lembaga pengawasan internal DPRD guna menegakan kode etik dan Tata Tertib DPRD. Maka terbentuklah Badan Kehormatan (BK) DPRD. Besaran pagu anggaran tahun 2022 Rp576.092.700,- setelah perubahan menjadi Rp729.378.140,- dengan realisasi Rp686.781.620,- dan sisa anggaran sebesar Rp42.596.520,-.

Adapun kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana yaitu:

- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRK Aceh Tengah terkait penegakan pelaksanaan kode etik dan sinergi penerapan/pengawasan peraturan DPR Aceh dengan DPRK se-Aceh tentang kode etik dewan, di Kabupaten Aceh Tengah, dari tanggal 24 s/d 27 Februari 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait pengawasan kode etik dan peraturan tata cara beracara, di Jakarta, dari tanggal 24 s/d 27 Februari 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRK Aceh Tengah terkait pelaksanaan dan pengawasan kode etik Dewan Terhormat, di Kabupaten Aceh Tengah, dari tanggal 16 s/d 18 Mei 2022.

- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPR Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD, di Sumatera Barat, dari tanggal 14 s/d 17 Juli 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRK Aceh Tengah terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD, di Kabupaten Aceh Tengah, dari tanggal 6 s/d 9 Juli 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD, di Sumatera Utara, dari tanggal 28 s/d 31 Juli 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait perubahan peraturantata cara beracara Badan Kehormatan, di Sumatera Utara, dari tanggal 25 s/d 28 Juli 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRK Aceh Tengah terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD, di Kabupaten Aceh Tengah, dari tanggal 6 s/d 9 Juli 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD, di Sumatera Barat, dari tanggal 14 s/d 17 Juli 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD, di Jakarta, dari tanggal 15 s/d 17 Agustus 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRK Aceh Selatan terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD, di Kabupaten Aceh Selatan, dari tanggal 8 s/d 11 Agustus 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRK Sabang terkait pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, di Kota Sabang, dari tanggal 29 Agustus s/d 1 September 2022.
- Mendampingi Ketua dan Anggota Badan Kehormatan dan Anggota DPR Aceh dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRK Sabang terkait pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, di Kota Sabang, dari tanggal 29 Agustus s/d 1 September 2022.

- Melakukan kunjungan kerja ke Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya terkait pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD, di Nagan Raya, dari tanggal 30 s/d 23 Oktober 2022.

i. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah

Tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu rapat dalam rangka fasilitasi kerjasama DPRA dan Sekretariat DPRA dengan pihak lain, rapat dalam rangka menerima kunjungan instansi/lembaga lainnya, rapat komisi DPRA, dan rapat kerja komisi-komisi DPRA dengan mitra kerja, dengan capaian kinerja sebesar 92,50%. Adapun jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 242.199.965,- dengan realisasi sebesar Rp211.386.940,- (87,28). Adapun kegiatan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah yang terlaksana, yaitu:

Komisi I

- Rapat Koordinasi Terkait Rancangan Keputusan KPU R.I Terhadap Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 pada hari Selasa, 15 Februari 2022.
- Rapat Mendengar Masukan dari Perwakilan Masyarakat Situban Makmur Kecamatan Danau Paris Terkait Masalah Pertanahan dan Sengketa Pertanahan dengan HGU PT. Delima Makmur pada hari Senin, 21 Februari 2022.
- Rapat Koordinasi Terkait Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Aceh terkait persiapan dan langkah awal dalam proses pembentukan Kabupaten/Kota baru pada hari Kamis 24 Februari 2022.
- Rapat Kerja Terkait Pemberian Lahan Bagi Mantan Kombatan GAM, Tapol/Napol dan Korban Konflik serta Persoalan Sengketa pemilik HGU PT. Setya Agung, PT. Delima Makmur, PT. Fajar Baizury & Bhoters's, PT. Semadam, PT. Patria Kamoe, dan HGU Kawasan Peunaron Aceh Timur pada hari Selasa, 1 Maret 2022.
- Rapat Koordinasi Terkait Penyelesaian dan Solusi Beroperasi Kembali Kapal Trawl di Perairan Aceh pada hari Kamis, 7 April 2022.

- Rapat Kerja Terkait Laporan Masyarakat Teunom Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Kinerja Manajemen Perusahaan PT. Agro Sinergi Nusantara pada hari Senin, 11 April 2022.
- Rapat Koordinasi Percepatan Pemasangan PBU Aceh-Sumut di perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat pada hari Selasa, 12 April 2022.
- Rapat Kerja Terkait Dengan Kelangkaan Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh ke Sejumlah SPBU pada Selasa, 12 April 2022.
- Rapat Klarifikasi Pemberian Gelar Teuku dan Cut Kepada Para Tokoh pada hari Senin, 18 April 2022.
- Rapat Mitra Kerja dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDM) pada hari Senin, 25 Juli 2022.
- Rapat Kerja terkait dengan tahapan – tahapan pelaksanaan pemilu Tahun 2024 pada hari Selasa, 2 Agustus 2022.
- Rapat Kerja terkait Status Kepegawaian Polisi Wilayatul Hisbah Seluruh Aceh pada hari Selasa, 16 Agustus 2022.
- Rapat kerja terkait dengan kegiatan sosialisasi peraturan daerah di Prov. Aceh pada hari senin, 03 Oktober 2022.
- Rapat kerja terkait dengan peran KKR Aceh menyangkut kerja Tim Non-yudisial penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada hari Selasa, 4 Oktober 2022.

Komisi II

- Rapat Kerja dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Rabu 16 Februari 2022
- Rapat Koordinasi masalah Plasma pada Perusahaan Perkebunan yang ada di Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam dengan Dinas pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanahan Aceh, Kanwil Pertanahan Aceh, Biro Hukum Setda Aceh, Bupati Singkil, Walikota Subulussalam, Perusahaan Perkebunan se Kabupaten Aceh Singkil, Perusahaan Perkebunan se Kota Subulussalam pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022

- Rapat Koordinasi masalah Distribusi Minyak goreng bersubsidi dengan Dinas Perindag Aceh, Bulog Aceh, Polda Aceh, Distributor Minyak Goreng, Wartawan Serambi Indonesia pada tanggal 22 Februari 2022
- Rapat rutin bulanan dengan Mitra Kerja pada hari Senin, 4 April 2022
- Rapat rutin bulanan dengan Mitra Kerja pada tanggal Senin/4 Mei 2022
- Rapat rutin bulanan dengan Mitra kerja SKPA pada tanggal Senin/6 Juni 2022
- Rapat rutin bulanan dengan Mitra kerja SKPA pada tanggal Senin/4 Juli 2022
- Rapat Internal Komisi II pada tanggal 2 Agustus 2022 2 Agustus 2022
- Rapat realisasi anggaran dengan mitra kerja Dinas Pangan pada tanggal 2 Agustus 2022
- Rapat realisasi anggaran dengan mitra kerja Dinas Peternakan pada tanggal 8 Agustus 2022
- Rapat realisasi anggaran dengan mitra kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 8 Agustus 2022
- Rapat realisasi anggaran dengan mitra kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan pada tanggal 9 Agustus 2022
- Rapat realisasi anggaran dengan mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 Agustus 2022
- Rapat realisasi anggaran dengan mitra kerja Dinas Koperasi dan UKM pada tanggal 15 Agustus 2022
- Rapat realisasi anggaran dengan mitra kerja Dinas Koperasi dan UKM pada tanggal 15 Agustus 2022
- Rapat realisasi anggaran dengan mitra kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 15 Agustus 2022

Komisi III

- Melakukan rapat internal Komisi terkait penyusunan dan penjadwalan agenda kerja Komisi Tahun 2022 dan hal-hal lain yang dianggap perlu pada tanggal 18 Januari 2022

- rapat kerja terkait persetujuan konsep kontrak kerja sama wilayah kerja migas konvensional di Wilayah Kewenangan Aceh pada Tanggal 7 Februari 2022
- rapat kerja dengan Direksi PT. Bank Aceh Syariah terkait optimalisasi kinerja dan pelayanan lembaga perbankan di Aceh guna mendukung recovery dan peningkatan ekonomi masyarakat pada Tanggal 9 Februari 2022
- rapat kerja dengan RCEO PT. Bank Syariah Indonesian Regional I Aceh terkait optimalisasi kinerja dan pelayanan lembaga perbankan di Aceh guna mendukung recovery dan peningkatan ekonomi masyarakat pada Tanggal 9 Februari 2022
- rapat kerja terkait peningkatan manajemen dan operasional pada proses eksploitasi dan produksi potensi minyak dan gas bumi di wilayah blok B Aceh Utara pada Tanggal 15 Februari 2022
- Komisi III DPR Aceh menerima kedatangan tamu DPRK Aceh Tamiang pada pukul 12.00 wib sampai dengan selesai pada Tanggal 17 Februari 2022
- Rapat koordinasi terkait Pemetaan Potensi Pendapatan Aceh dengan Kakanwil DJP Perwakilan Aceh, Kakanwil Bea dan Cukai Perwakilan Aceh, Inspektorat Aceh, Kepala BPMA, Bappeda, BPKA, Dinas ESDM Aceh, DPMPTSP Aceh serta Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setda Aceh pada tanggal 14 April 2022
- Rapat Kerja terkait Pembagian Deviden dari Sektor Minyak dan Gas Bumi Aceh dengan BPMA, BPKA dan Dinas ESDM Aceh pada tanggal 2 Juni 2022
- Rapat Kerja terkait permohonan hibah Barang Milik Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan BPKA, Bappeda dan Inspektorat pada tanggal 2 Juni 2022
- Rapat Kerja terkait permohonan hibah Barang Milik Aceh berupa tanah yang terdapat di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh kepada Universitas Syiah Kuala dengan BPKA, Bappeda, Inspektorat pada tanggal 30 Juni 2022
- Rapat koordinasi terkait usulan kegiatan DOKA TA 2022 Pemkab Pidie dengan DPRK Pidie pada tanggal 12 Juli 2022

- Rapat Kerja lanjutan terkait permohonan hibah Barang Milik Aceh berupa tanah yang terdapat di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh kepada Universitas Syiah Kuala dengan Perwakilan dari USK, Direktur RSGM, BPKA dan Inspektorat pada tanggal 19 Juli 2022
- Rapat pleno Komisi terkait permohonan hibah Barang Milik Aceh berupa tanah yang terdapat di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh kepada Universitas Syiah Kuala pada tanggal 19 Juli 2022
- Rapat kerja dengan Dewan Direksi PT. Bank Aceh Syariah terkait manajemen dan pengelolaan PT. Bank Aceh Syariah dengan Dewan Direksi Bank Aceh Syariah pada tanggal 1 Agustus 2022
- Rapat kerja dengan BPKA terkait optimalisasi potensi penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan pengelolaan aset milik Pemerintah Aceh pada tanggal 9 Agustus 2022
- Rapat kerja dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tanggal 8 September 2022

Komisi IV

- Rapat Kerja dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh pada hari Rabu/19 Januari 2022
- Rapat Kerja dengan SKPA Mitra Kerja (Dinas PUPR Aceh, Dinas Perkim Aceh, Biro PBJ Setda Aceh) pada hari Jumat / 18-2-2022
- Rapat Kerja dengan SKPA (Tim Asistensi Pemerintah Aceh, Dinas Penagiran Aceh, Dinas PUPR dan Biro PBJ Setda Aceh pada Hari Selasa – Rabu, 2-3 Maret 2022
- Rapat Kerja dengan SKPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada hari Senin 6 Juni 2022
- Rapat Kerja dengan SKPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada hari Kamis, 4 Agustus 2022

Komisi V

- Rapat Komisi V DPR Aceh dengan Mitra Kerja yang bertujuan untuk melakukan rapat koordinasi guba mendengar tentang program kegiatan Tahun anggaran 2022
- Rapat Internal Komisi V DPR Aceh pada 13 Mei 2022
- Rapat Internal Komisi V DPR Aceh pada tanggal 1 Agustus 2022
- Rakor tentang JKN -JKA tanggal 11 - 12 Agustus 2022
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi V DPR Aceh pada 31 Agustus 2022
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi V DPR Aceh pada tanggal 1 September 2022
- Rakor tentang JKN -JKA pada tanggal 21 September 2022
- Audiensi dengan Igornas tanggal 19 Oktober 2022
- Audiensi dengan Perdoski tanggal 21 Oktober 2022
- Rapat Internal Komisi V DPR Aceh pada tanggal 24 Oktober 2022
- Rakor dengan RSIA, Dinkes dan RSUDZA pada tanggal 14 November 2022
- Rakor dengan RSIA dan DPMG pada tanggal 12 Desember 2022
- Rapat Internal Komisi V DPR Aceh pada tanggal 22 Desember 2022

Komisi VI

- Rapat Internal Komisi VI DPR Aceh
- Rapat Kerja terkait dengan realisasi dan evaluasi dan program/kegiatan baitul mal tahun 2021 dan program /kegiatan baitul mal tahun anggaran 2022
- Rapat Kerja terkait dengan realisasi dan evaluasi dan program/kegiatan dinas pendidikan dayah aceh tahun 2021 dan program /kegiatan baitul mal tahun anggaran 2022
- Rapat Kerja terkait dengan realisasi dan evaluasi dan program/kegiatan dinas syariat islam tahun 2021 dan program /kegiatan baitul mal tahun anggaran 2022
- Rapat Kerja terkait dengan realisasi dan evaluasi dan program/kegiatan dinas pendidikan aceh tahun 2021 dan program /kegiatan baitul mal tahun anggaran 2022
- Rapat internal komisi VI DPR Aceh

- Rapat koordinasi terkait dengan kepengurusan BMA dan MAA
- Rapat Internal Komisi VI DPR Aceh terkait Penjadwalan rapat bersama mitra kerja
- Rapat Internal Komisi VI DPR Aceh
- Rapat Internal Komisi VI DPR Aceh
- Rapat Internal Komisi VI DPR Aceh
- Rapat Kerja terkait dengan Realisasi Anggaran dan Program/kegiatan Dinas Pendidikan Aceh tahun Anggaran 2022 dan Evaluasi Program Kegiatan Tahun 2023
- Rapat Koordinasi dengan Dinas Syariat Islam Aceh mengikutsertakan UPTD Mesjid Raya Baiturrahman, MPU dan Satpol PP Wh Aceh, Biro Hukum Setda Aceh
- Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Aceh
- Rapat Kerja terkait dengan Realisasi Anggaran dan Program Kegiatan Badan Baitul Mal Aceh T.A 2022
- Rapat kerja terkait dengan Realisasi Anggaran dan Program Kegiatan Pendidikan Dayah Aceh T.A 202
- Rapat bersam mitra kerja komisi VI DPRA Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

Adapun Audiensi yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRA pada tahun 2022 yaitu:

No.	Hari / Tanggal	Yang melakukan Audiensi	Perihal
1.	Rabu, 5-1-22 Jam 14.00 WIB	Manajemen Tim Sepakbola Suratin Abdya	Silaturahmi dengan Wakil Ketua DPR Aceh
2.	Senin, 17-1-22 Jam 10.00 WIB	Aliansi Muslimat Aceh	Kegelisahan terkait Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sangat meresahkan kaum perempuan.
3.	Senin, 17-1-22 Jam 14.00 WIB	Baitul Mal Aceh	Silaturahmi Komisioner Baitul Mal Aceh yang baru dengan Ketua DPRA
4.	Senin, 17-1-22 Jam 16.00 WIB	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh	Silaturahmi Pengurus PWI Aceh yang baru dengan Ketua DPRA
5.	Senin, 17-1-22 Jam 14.00 WIB	Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Aceh	Silaturahmi terkait dengan Pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh
6.	Kamis, 20-1-22 Jam 11.00 WIB	Komisi Pengawasan dan Pelindungan Anak Aceh	Permohonan Audiensi Dan penyerahan laporan Kinerja KPPAA periode 20217- 2022

7.	Selasa, 08-2-22 Jam 14.30 WIB	BEM Nusantara Koordinator Daerah Aceh	Audiensi Meningkatkan Nilai Kearifan Lokal Menuju Indonesia Emas 2024
8.	Selasa, 08-2-22 Jam 14.00 WIB	Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII)	Silaturahmi dengan Wakil Ketua DPR Aceh
9.	Selasa, 15-2-22 Jam 10.30.00 WIB	Tuagila Badminton Club	Bersilaturahmi Memohon arahan dan dukungan dengan bapak selaku ketua PBSI Prov Aceh kami menjelaskan program serta arahan dan dukungan untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan ini.
10.	Selasa, 15-2-22 Jam 11.30.00 WIB	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan sinergitas Pengusaha Muda dalam mengdongkrak perekonomian Aceh.
11.	Rabu, 23 Maret 2022 Jam 14.000 WIB	Audiensi Komisi Nasional	Silaturahmi Dengan Plt Wakil ketua DPRA dalam rangka untuk saling memperkenalkan Lembaga dan personalia Pengurus Komda LP_KPK provinsi Aceh Tentang Program dan Rencana kerja kami serta menjalin hubungan Kemitraan yang pada Hakikatnya untuk Kepentingan Masyarakat.
12.	Rabu, 23 Maret 2022 Jam 13,30.00	Asosialisasi Kontraktor Aceh	Bersilaturahmi Sekaligus meminta kesediaan bapak untuk memberikan kata sambutan pada Acara tersebut. Adapun jadwal susunan acara sebagaimana terlampir.
13.	Kamis 17 Maret 2022 Jam 15, 30.00	Aceh Bike Race Mountain Bike	Bersilaturahmi dan meminta dukungan acara event yang mengacu pada Regulasi PB ISSI Persiapan Atlit menuju PORA XIV PIDIE, PON bersama Aceh sumatra Utara.
14.	Jum'at 15 juli 2022 Jam 16.30 Wib	Himpunan Mahasiswa Islam	Bersilaturahmi dengan Ketua DPR Aceh sehubungan sudah terbentuknya kepengurusan yang baru, Badan Koordinasi HMI Aceh (BADKO HMI ACEH)
15.	Rabu 29 Juli 2022 15.00 Wib	Dema Fakultas Ekonomi Bisnis UIN AR-Raniry Banda Aceh	Audiensi dan silaturahmi dengan Pimpinan DPR Aceh.
16.	Rabu 29 Juni 2022 16.30.0 Wib	Senat Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry	Audiensi Sekaligus menyabung tali Silaturahmi dalam rangka bersilaturahmi dalam rangka mendiskusikan perkembangan Rakyat Aceh Dalam Perspektif Akademik
17.	Senin 25 Juli 2022 12.30.00 Wib	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Audiensi Sekaligus terkait kegiatan PPNI Agar dapat di support Dana dalam APBA dan PPNI untuk Mengiprah dalam pembaguna Aceh dan Nasional serta bersama-sama membantu dalam kegiatan Masyarakat dll Di Aceh.

18.	Senin 17 Januari 2022 14.00 wib	Ketua dan Anggota Badan Baitul Mal Aceh.	Silaturahmi keanggotaan Badan Baitul Mal Aceh. Kami Berharap bapak Berkenaan meluangkan Waktu menerima untuk Audie
19.	Senin 17 Januari 2022 10.00 wib	Aliansi Muslimah Aceh	Silaturahmi membahas raqan bahasa yang akan menjadi identitas Aceh kedepannya penggunaannya
20.	Senin 17 Januari 2022 11.00 wib	Masyarakat Ekonomi Syari'ah	Silaturahmi sekaligus ingin mengundang Ketua DPR Aceh menghadiri Acara penlantikan MES provinsi Aceh T.H 2021-2024 sebagai salah satu Dewan Pembina selain Gubernur dll di pengurus yang baru.
21.	Senin 17 Januari 2022 16.00 wib	Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh	Sehubungan dengan telah dilakukanya pelantikan pengurus PWI Aceh Masa Baskti 2021-2024 dikota Sabang pada tanggal 06 Desember 2021.
22.	Kamis 20. Januari 2022 11.00 wib	Audiensi Bersama KPPA Aceh	Penyerahah Laporan Kinerja KPPAA Priode 2021-2022
23.	Rabu 16 Februari 2022 14.00 Wib.s/d selesai	Audiensi Bersama Himpunan Pengusaha Muda Aceh Indonesia.	Bersama Himpunan Pengusaha Muda Aceh Indonesia melaksanakan Beberapa Kegiatan untuk meningkatkan sinergitas pengusaha muda dalam rangka mendokrak perekonomian Aceh

Kunjungan Kerja yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRA pada tahun 2022 yaitu:

No.	Hari / Tanggal	Yang melakukan Kunjungan	Perihal
1.	Kamis, 10-2- 2022 Jam 11.00 WIB	Sekretariat DPRK Aceh Timur	Mencari masukan tentang peran serta DPR Aceh terkait mewujudkan perkebunan yang maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan kontribusi subsektor perkebunan terhadap perkebunan Ekonomi Daerah.
2.	Kamis, 10-2- 22 Jam 14.00 WIB	DPRK Bireuen	Konsultasi untuk memperoleh Informasi lebih mendalam mengenai pembangunan Stadion Sepak Bola di Kabupaten Bireuen
3.	14 Februari 2022	Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumut	Rapat terkait dengan Kode Etik
4.	23 Februari 2022	DPRK Pidie Jaya	Konsultasi terkait Kepastian Pembangunan Gedung Administrasi RSUD Pidie Jaya sumber anggaran APBA Tahun 2022
5.	8 Juni 2022	Pimpinan DPRK Pidie Jaya	Konsultasi dalam rangka Anggota Komisi A dan Komisi C DPRK Pidie Jaya, Melaksanakan Konsultasi ke DPR Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terkait dengan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pidie Jaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

6.	22 Juni 2022	Wakil Ketua DPRK Aceh Barat	Dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi Terkait mekanisme dan Tahapan Pemilu 2024.
7.	Selasa 02 Agustus 2022 10.00 Wib	Pimpinan DPRD Provinsi Bali	Menerima Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD Provinsi Bali Dalam Rangka sharing Informasi terkait Pengembangan Desa Wisata Di Aceh.
8.	Kamis 11 Agustus 2022 15.00 Wib	Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta	Menerima Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta.
9.	11 Agustus 2022	Wakil Ketua DPRK Nagan Raya	Koordinasi dan Konsultasi dengan DPR Aceh tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020
10.	19 Agustus 2022	Panmus DPRK Aceh Utara	Konsultasi tentang Badan Musyawarah
11.	22 Agustus 2022	Dubes Rusia	Kunjungan Kerja terkait dengan Kerjasama pertukaran mahasiswa dll
12.	13 September 2022	DPRD Provinsi Sumut	Kunjungan Kerja
13.	4 Oktober 2022	DPRK Aceh Utara	Konsultasi
14.	7 Oktober 2022	DPRD Provinsi Sumut	Kunjungan Kerja
15.	18 November 2022	DPRD Kab. Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat	Studi Kooperatif tentang Kode Etik, Prolega Tahun 2023 dan mekanisme pelaksanaan Program Perbaikan rumah tidak layak huni melalui anggaran Pokir.
16.	5 Desember 2022	DPRD Kota Palangkaraya	Study Banding Komisi C DPRD Kota Palangkaraya

j. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Pimpinan dan Anggota DPRA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu melakukan kunjungan kerja ke luar daerah untuk berkoordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan agenda, tugas dan fungsi DPRD. Dalam hal ini Sekretariat DPRA melalui Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan telah memfasilitasi kegiatan tersebut di atas sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.652.602.000,- setelah perubahan menjadi Rp.5.368.500.000,- dengan realisasi Rp. 5.293.945.955,- (98,61%). Adapun kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana, yaitu:

Komisi I

- Komisi I DPRA melakukan konsultasi dengan Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.
- Komisi I DPRA melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan konten digital yang disiarkan di Aceh harus berdasarkan dengan aturan yang berlaku seperti penerapan Syariat Islam dan pemutaran azan setiap waktu shalat.
- Koordinasi ke DPRD Sumatera Utara terkait perselisihan batas antar Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat, serta Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo, telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun korban jiwa sehingga diperlukan penyelesaian yang lebih komprehensif antar pengambil kebijakan di tingkat provinsi.
- Koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Republik Indonesia terkait dengan sanksi dan tekanan kepada Perusahaan HGU dan Kementerian ATR/BPN RI untuk memberikan data HGU di Aceh kepada DPR Aceh karena banyaknya persoalan sengketa HGU antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin di Aceh dimana dalam setiap rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPR Aceh tidak diberikan data hukum perizinan baik oleh perusahaan maupun dinas terkait. Selanjutnya rencana pembentukan Pansus HGU oleh DPR Aceh juga sangat dibutuhkan data dan dokumen HGU.
- Konsultasi ke Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia karena dengan dipanggil dan belum keluarnya hasil fasilitasi terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan yang sudah memasuki bulan April 2022 dimana rancangan qanun dimaksud telah disampaikan fasilitasi pada bulan Desember 2021 kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Konsultasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait beredarnya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Komisi I DPRA akan melakukan Konsultasi KeMenpan RB untuk mempertanyakan status kejelasan tenaga kontrak di Aceh, mengingat Aceh sebagai Daerah Istimewa.

- Konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dana kegiatan verifikasi Partai Politik Lokal dan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari Tahapan Pemilu serentak Tahun 2024, beserta rincian komponen kegiatan pendukung terkait lainnya (konteks lokal wilayah Aceh adalah uji baca Al-Quran).
- Konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan standar pelayanan publik yang diterapkan Provinsi Sumatera Utara dalam mempertahankan Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau guna menjadi bahan evaluasi kepada instansi agar memperbaiki standar pelayanan pada unit layanan di Provinsi Aceh.
- Konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berkenaan dengan tindaklanjut penyelesaian terkait dengan Pertanahan baik secara politik, dan teknis serta baik secara formal dan informal.

Komisi II

- Konsultasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang R.I di Jakarta terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Plasma dan Studi Banding lapangan terkait Program inseminasi Buatan pada konsentrasi peternakan di Jawa Barat 23 s.d 28 Februari 2022
- Melakukan Konsultasi Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Terkait Sumber Daya Pengamanan Hutan 22 s.d 25 Maret 2022
- Melakukan Konsultasi Ke Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Di Provinsi Aceh 27 s.d 30 Maret 2022
- Konsultasi ke Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait penyelesaian dan solusi

terhadap beroperasinya kapal trawl di wilayah Aceh dan kunker sekaligus peninjauan terkait pengembangan industry kreatif ke Jakarta dan Yogyakarta pada tanggal 13 s.d 18 April 2022

- Konsultasi ke Kementerian Koperasi terkait program koperasi syariah di Aceh ke Jakarta pada tanggal 21 s.d 24 April 2022
- Koordinasi ke Pemerintahan SUMUT terkait pengembangan Kawasan Industri Ladong pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2022
- Koordinasi dan peninjauan ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat terkait pelestarian dan perlindungan satwa liar 28 September –2 Oktober
- Koordinasi ke DPRD Kota Malang serta peninjauan ke lokasi pertanian dan peternakan Kota Malang 10-15 November
- Konsultasi ke Kementerian Pertanian RI dan Kunjungan ke Balai Inseminasi buatan Lembang Jawa Barat 17-22 November

Komisi III

- Melakukan koordinasi ke DPRD Sumatera Utara terkait optimalisasi regulasi dan manajemen pengelolaan aset milik daerah 03 s/d 06 Maret 2022
- Melakukan kunjungan terkait inventarisasi jumlah aset milik Pemerintah Aceh yang terdapat di Pulau Jawa serta proses pengembangan dan permasalahannya ke Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta 15 s/d 18 Maret 2022
- Melakukan koordinasi terkait peningkatan kapasitas lembaga legislatif dalam pengawasan penggunaan anggaran ke DPRD Provinsi Bali serta menghadiri undangan kegiatan dalam rangka Festival Adat dan Budaya Nusantara I-Bali 16 s/d 20 Agustus 2022
- Melakukan pengawasan penggunaan anggaran terhadap pengembangan sarana dan prasarana Anjungan Pemerintah Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta 23 s/d 26 Agustus 2022
- Melakukan koordinasi terkait pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi Anjungan Milik Pemerintah Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada tanggal 29 November s.d 2 Desember 2022

- Melakukan peninjauan terhadap asset milik Pemerintah Aceh ke Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta pada tanggal 3 s/d 6 Desember 2022
- Menghadiri undangan acara "Syukuran selesainya revitalisasi Anjungan Pemerintah Aceh TMII dan Pagelaran Seni Budaya Aceh dengan tema Semarak Seni Budaya Aceh" di Anjungan Pemerintah Aceh Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada tanggal 11 s/d 14 Desember 2022
- Melakukan koordinasi terkait pengelolaan dan kondisi aset milik Pemerintah Aceh sebagai asrama mahasiswa di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 s/d 17 Desember 2022

Komisi IV

- Konsultasi dan Koordinasi terkait Pembangunan dan Normalisasi Daerah Aliran Sungai Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya di Jakarta 3 s.d 6 Februari 2022
- Konsultasi dan Koordinasi terkait Strategi Pengembangan wilayah berbasis pada rencana tata ruang wilayah ke Sumatera Utara 3 s.d 6 Februari 2022
- Konsultasi dan Koordinasi terkait Konsep Pengawasan Perencanaan Pembangunan di Sumatera Utara 8 s.d 11 Februari 2022
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Prov. Sumut terkait peningkatan pelayanan Jasa Transportasi Publik di Sumut Tanggal 17 - 120 Maret 2022
- Melakukan koordinasi dengan DPRD Prov. Jawa Timur terkait Pengalokasian Belanja Modal di Sektor Keciaptakaryaan Tanggal 24 Maret - 27 April 2022
- Melakukan konsultasi ke Komisi V DPR RI terkait pembangunan saluran drainase pada jalan ruas nasional di Jakarta Tanggal 25 - 28 April 2022
- Melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait pengawasan pembangunan infrastruktur di Jakarta Tanggal 16 - 18 Mei 2022
- Melakukan konsultasi ke Komisi V DPR RI terkait Pembangunan Jalan dua Jalur Ruas Simpang Batre – Blang Blahdeh Kab. Bireuen Komisi V DPR RI tanggal 14 s.d 17 Juni 2022

- Melakukan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat di Aceh untuk sektor Sumber Daya Air dan Pekerjaan Umum Tanggal 29 Juni s.d 3 Juli 2022
- Melakukan konsultasi ke Komisi V DPR RI terkait Pembangunan Perlengkapan Jalan Nasional tanggal 23 s.d 26 Oktober 2022
- Melakukan konsultasi ke Komisi V DPR RI terkait Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pante Lhoong Kab. Bireuen tanggal 20 s.d 23 November 2022
- Melakukan koordinasi ke DPRD Sumatera Utara terkait Keselamatan lalu lintas pada saat bencana sebagai upaya mitigasi kecelakaan lalu lintas tanggal 29 November s.d 2 Desember 2022
- Melakukan koordinasi ke Provinsi Sumatera Utara Penataan Kawasan Permukiman pada Tanggal 21 s.d 24 Desember 2022

Komisi V

- Konsultasi ke Deputy Bidang Perencanaan Rehabilitas dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta terkait dengan program kegiatan pasca bencana banjir yang terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Aceh, terhitung sejak tanggal 19 Januari sampai dengan 22 Januari 2022.
- Konsultasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang kegiatan untuk pengembangan dan pembinaan daerah tertinggal terhitung sejak tanggal 13 Februari sampai dengan 16 Februari 2022.
- Konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait dengan fungsi pengawasan peraturan daerah serta implementasinya terhadap pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor hubungan ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja asing dan tenaga kerja jangka waktu tertentu yang bekerja pada perusahaan BUMN dan Swasta terhitung sejak tanggal 23 Februari sampai dengan 26 Februari 2022
- Konsultasi ke IDI Jakarta 7 s.d 10 April 2022
- Konsultasi ke BKKBN tanggal 15 s.d 18 Juni 2022

Komisi VI

- melakukan kunker ke DISBUDPAR Sumut terkait pengelolaan dan pengembangan potensi destinasi pariwisata&cagar Budaya di Medan
- Kunjungan Kerja ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara
- Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara
- Kunjungan Kerja ke Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
- Konsultasi ke Kementrian Agama R.I terkait pendapatan zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat aceh tiap tahun terus meningkat
- Konsultasi ke Basnaz dalam rangka meningkatkan peran legislative dalam bidang keagamaan demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan harta aqgama lainnya
- Konsultasi dan Peninjauan ke Anjungan Pemertintah Aceh di Taman Mini Indonesia Indah
- Kunjungan Kerja Komisi VI ke Pron Jabar dan DKI Jakarta
- Undangan kegiatan Revitalisasi Anjungan Pemetintah Aceh di TMII

k. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Laporan kinerja DPRD adalah dokumen laporan yang berisi tentang capaian kinerja DPRA yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun kegiatan yang dilaporkan tersebut adalah kegiatan Pembahasan Rancangan Qanun, Pembahasan Anggaran, Kegiatan Pengawasan, Reses, Rapat Paripurna DPRA, rapat-rapat AKD, sosialisasi Qanun, Bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRA, dan Kegiatan Rapat koordinasi, dengan capaian kinerja sebesar 100% (1 Dokumen). Pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini adalah Rp. 121.225.000,-, dengan realiasi sebesar Rp. 96.039.443 (79,22%).

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan Rapat Paripurna selama 3 masa persidangan dengan jumlah rapat yang terlaksana sebanyak 40 kali, Rapat Badan Musyawarah terlaksana sebanyak 24 kali, dan Rapat Badan

Legeslasi terlaksana sangat intens, dengan total pelaksanaan rapat sebanyak 72 kali dari 75 kali rapat yang ditargetkan (96%).

Alokasi pagu anggaran murni untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 1.431.746.500, dan bertambah menjadi Rp. 1.739.216.700 setelah perubahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.624.518.700,- (93,41%). Adanya penambahan anggaran ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang pada awalnya tidak direncanakan, seperti pelantikan Ketua DPRA sisa masa jabatan Tahun 2019-2024, Wakil Ketua DPRA sisa masa jabatan Tahun 2019-2024, dan pelantikan Pj. Gubernur Aceh. Adapapun pelaksanaan rapat paripurna dan rapat lainnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Rapat Paripurna Masa Persidangan I

NO.	TANGGAL	AGENDA	KET
1.	11 Januari 2022 Pukul 14:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan I DPR Aceh Tahun 2022 dan Persetujuan terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi Qanun Aceh.	Pemerintah Aceh Assisten I Setda Aceh
2.	04 Februari 2022 Pukul 14:30 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dalam rangka Pengambilan Sumpah Pelantikan Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.	Pemerintah Aceh Gubernur Aceh
3.	Pukul 16:00 WIB	Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPR Aceh.	
4.	1 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dalam rangka: a. Penetapan Pansus Pembahas Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Lembaga Wali Nanggroe dan Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh; b. Penetapan Pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Partai Demokrat; dan c. Penyampaian Laporan Hasil Reses I Tahun 2022	Pemerintah Aceh Assisten I Setda Aceh (tunda)
5.	21 Maret 2022 Pukul 14:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dalam rangka Penetapan Penggantian Ketua DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh.	Pemerintah Aceh Assisten I Setda Aceh
6.	12 April 2022 Pukul 22:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dalam rangka: a. Penyampaian LKPJ Gubernur Aceh TA 2021	Pemerintah Aceh Gubernur Aceh

		b. Persetujuan Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur Aceh TA 2021 c. Pengumuman Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Qanun Aceh tentang : 1).Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe 2). Tata Niaga Komoditas Aceh d. Penyampaian Laporan Reses I DPR Aceh Tahun 2022	Gedung Utama DPR Aceh
7.	28 April 2022 Pukul 14:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021.	Gedung Utama DPR Aceh
8.	13 Mei 2022 Pukul 14:30 WIB	Rapat Paripurna dengan Agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Ketua DPRA Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.	Gedung Utama DPR Aceh
9.	3 Juni 2022 Pukul 14 :30 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda: 1. Penyampaian Pengumuman Usul Pemberitahuan Gubernur Aceh 2. Penyampaian Rekomendasi DPR Aceh terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021; 3. penutupan Masa Persidangan I DPR Aceh Tahun 2022	Gedung Utama DPR Aceh

Rapat Paripurna Masa Persidangan II

NO.	TANGGAL	AGENDA	KET
1.	3 Juni 2022 Pukul 15: 30 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda : 1. Pembukaan Masa Persidangan II DP Aceh Tahun 2022 2. Penyampaian Penjelasan Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBA tahun Anggaran 2021	Gedung Utama DPR Aceh
2.	30 Juni 2022 Pukul 10:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dalam rangka Penyampaian Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021	Gedung Utama DPR Aceh
3.	30 Juni 2022 Pukul 20:30 WIB	Penyampaian Jawaban/Tanggapan Gubernur Aceh terhadap Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh.	
4.	1 Juli 2022 Pukul 14:30 WIB	Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang	Gedung Utama DPR Aceh

5.	1 Juli 2022 Pukul 20:30 WIB	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021 1. Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021. 2. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021.	Pemerintah Aceh Pj. Gubernur Aceh
6.	6 Juli 2022 Pukul 08:30 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Pelantikan Penjabat Gubernur Aceh atas nama Achmad Marzuki	Pemerintah Aceh Pj. Gubernur Aceh
7.	15 Juli 2022 Pukul 14:30 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023.	Pemerintah Aceh Pj. Gubernur Aceh
8.	26 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda Penetapan Reposisi Anggota Alat Kelengkapan DPR Aceh Sisa Masa Jabatan 2019-2024	.
9.	18 Agustus 2022 Pukul 14:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda Penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023.	Pemerintah Aceh Pj. Gubernur Aceh
10.	5 September 2022 Pukul : 20:30 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dan Penutupan Masa Persidangan II DPR Aceh Tahun 2022 serta Pembukaan Masa Persidangan III DPR Aceh Tahun 2022.	Pemerintah Aceh Pj. Gubernur Aceh

Rapat Paripurna Masa Persidangan III

NO.	TANGGAL	AGENDA	KET
1.	7 September 2022 Pukul : 10:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR Aceh sisa masa jabatan Tahun 2019-2024.	Pemerintah Aceh Assisten III Setda Aceh
2.	9 September 2022 Pukul 14:30 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda a. Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 b. Penyampaian Nota Keuangan dan penjelasan terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Aceh

3.	16 September 2022 Pukul 14:30 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.	Gedung Utama DPR Aceh
4.	22 September 2022 Pukul 10:00 WIB	Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.	Gedung Utama DPR Aceh
5.	Pukul 20:30 WIB	Penyampaian Jawaban/Tanggapan Gubernur Aceh terhadap Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh.	
6.	23 September 2022 Pukul 14:30 WIB	Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022	Gedung Utama DPR Aceh
7.	Pukul 20:30 WIB	1. Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022. 2. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.	
8.	11 November 2022 Pukul 14:30 Wib	a. Rapat paripurna DPR Aceh tahun 2022 dengan agenda Peresmian Pengangkatan Penggantinya Antarwaktu Anggota DPR Aceh Sisa masa Jabatan Tahun 2019-2024.	Gedung Utama DPR Aceh
9.	Pukul 16:00 Wib	b. Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda : 1. Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2023; dan 2. Penetapan Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh Tahun 2023.	
10.	22 November 2022 Pukul 14:00 Wib	Penyampaian Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023.	Gedung Utama Aceh
11.	Pukul 20:30 Wib	Penyampaian Jawaban/Tanggapan Gubernur Aceh atas Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023.	
12.	23 November 2022 Pukul 14:00 Wib	Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023.	Gedung Utama Aceh
13.	Pukul 20:30 Wib	Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023.	

Rapat Badan Musyawarah

NO.	TANGGAL	AGENDA	KET
1.	20 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB	Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh dengan agenda: a. Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Reses I Pimpinan dan Anggota DPR Aceh tahun 2022; b. Penunjukan dan Penetapan AKD Penyiapan dan Pembahas Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022; dan c. Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dalam Rangka Pelantikan Anggota KKR	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh
2.	22 Februari 2022 Pukul 14:00 WIB	Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh dengan agenda Penjadwalan Rapat Paripurna dalam rangka: a. Penetapan Pansus Pembahas Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Lembaga Wali Nanggroe dan Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh; b. Penetapan Pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Partai Demokrat; dan c. Penyampaian Laporan Hasil Reses I Tahun 2022	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh
3.	15 Maret 2022 Pukul 14:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dalam rangka Penetapan Penggantian Ketua DPR Aceh.	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh
4.	8 April 2022 Pukul 14:30 WIB	1. Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dalam rangka: a. Penyampaian LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021 b. Penetapan Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh 2. Penyerahan Laporan Reses I Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Tahun 2022.	(Tunda)
5.	11 April 2022 Pukul 22:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dalam rangka: a. Penyampaian LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021 b. Penetapan Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh c. Penyerahan Laporan Reses I Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Tahun 2022	Ruang Serba Guna DPR Aceh
6.	11 Mei 2022 Pukul 14:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dengan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Ketua DPR Aceh Sisa Masa Jabatan 2019-2024	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh

7.	31 Mei 2022 Pukul 10:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dalam rangka: a. Penyampaian Pengumuman Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh b. Penyampaian Rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 c. Penyampaian Penjelasan terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021 d. Penutupan Masa Persidangan I DPR Aceh Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan II DPRA Tahun 2022	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh
8.	27 Juni 2022 Pukul 14:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dalam rangka Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh
9.	05 Juli 2022 Pukul 15:30 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda Pelantikan Penjabat Gubernur Aceh atas nama Achmad Marzuki	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh
10.	14 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan Agenda Penyampaian Rancangan Qanun KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh
11.	25 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB 25 Juli 2022 Pukul 16:30 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penetapan Reposisi Anggota Alat Kelengkapan DPR Aceh Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Penetapan Penggantian Pimpinan DPR Aceh Sisa Masa Jabatan 2019-2024	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh TUNDA
12.	12 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda Penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023.	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh TUNDA
13.	15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda Penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023.	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh
16.	5 September 2022 Pukul 10:00 WIB	2. Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda : a. Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRA; dan b. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 3. Usul Pembentukan Panitia Kerja Penyusunan RKT DPRA Tahun 2023	Ruang Rapat Serba Guna DPR Aceh

17.	27 Oktober 2022 Pukul 10:00 WIB	Pertemuan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara, DPRK Pidie Jaya, dan DPRK Aceh Selatan terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.	Ruang Rapat Badan Anggaran DPR Aceh
18.	8 November 2022 Pukul 14:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda : a. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023; b. Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2023; c. Penetapan Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh Prioritas Tahun 2023; d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Gerinda; e. Hal-hal lain yang dipandang perlu.	Ruang Serba Guna DPR Aceh
19.	17 November 2022 Pukul : 15:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda Penetapan pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Partai Golkar Sisa Masa Jabatan 2019-2024.	Ruang Serba Guna DPR Aceh
20.	21 November 2022 Pukul: 14:00 WIB	Penjadwalan Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2022 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023.	Ruang Serba Guna DPR Aceh

Rapat Pimpinan DPRA

NO.	TANGGAL	AGENDA	KET
1.	14 Maret 2022 Pukul 12:00 WIB	Penjadwalan Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penetapan Rapat Paripurna Penggantian Ketua DPR Aceh	

m. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Berdasarkan Pasal 33 huruf (d), (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pimpinan DPARD mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya. Selanjutnya pada Pasal 127, DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang; Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Jumlah Pagu

Anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp.1.453.002.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 2.999.591.000,- dengan Realisasi Rp. 2.718.101.033,- (90,62%). Adapun kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang terlaksana, yaitu:

1) H. Dahlan Jamaluddin, S.IP

- Menghadiri Acara Penganugerahan Tokoh Waspada 2021 di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 s.d 13 Januari 2022.
- Melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2021 ke Kab.Pidie Jaya pada tanggal 21 s.d 23 Januari 2022.
- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota Forbes DPR RI Asal Aceh guna mendiskusikan langkah-langkah taktis dan strategis Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XXI/2024 Wilayah Aceh di Jakarta pada tanggal 7 s.d 10 Februari 2022.
- Menghadiri undangan acara Customer Gathering Bank Aceh di Jakarta pada tanggal 31 Januari s.d 3 Februari 2022.
- Melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2021 ke Kab. Pidie pada tanggal 25 s.d 28 Februari 2022.
- Melakukan Koordinasi ke DPR RI terkait Advokasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh ke Jakarta pada tanggal 1 s.d 5 Maret 2022.
- Menghadiri dan memberikan sambutan pada Upacara Wisuda ke-60 Tahun akademik 2021/2022 Universitas Widya Mataram Yogyakarta dan Pertemuan dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di lanjutkan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPR RI terkait dana Otsus pada tanggal 12 s.d 19 Maret 2022.
- Melakukan Rapat Koordinasi terkait Advokasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke Kab. Pidie pada tanggal 28 s.d 31 Maret 2022.
- Menjadi narasumber dalam kegiatan Peer Review (Telaah Pakar) Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Melakukan Koordinasi ke Bawaslu R.I

terkait Qanun Pemilu dan Qanun Pilkada di Jakarta pada tanggal 19 s.d 23 April 2022

2) Saiful Bahri

- Melakukan kunjungan lapangan terkait pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 14 s.d 17 Mei 2022.
- Melakukan pertemuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan Menghadiri Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kementerian Keuangan RI dilanjutkan peninjauan ke Kantor Penghubung Pemerintah Aceh terkait asset Aceh serta melakukan Koordinasi dan konsultasi ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 s.d 31 Mei 2022
- Melakukan kunjungan Lapangan terkait Pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 3 s.d 5 Juni 2022.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPR RI di Jakarta pada tanggal 9 s.d 12 Juni 2022.-
- Menghadiri kegiatan Pengukuhan dan penguatan kelembagaan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ke Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2022.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait pengusulan penablat Gubernur Aceh dan Meninjau aset Pemerintah Aceh yang di kelola oleh Badan Penghubung pemerintah Aceh di Jakarta dan melakukan pertemuan dengan tokoh Nasional asal Aceh di Jakarta pada tanggal 17 s.d 20 Juni 2022.
- Menghadiri dan melakukan konsultasi bersama Business Audiensi dari kalla A Group of Companies di Kota Makasar pada tanggal 1 s.d 4 juli 2022.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 serta menghadiri undangan kegiatan rapat koordinasi tentang Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

- Melakukan kunjungan lapangan dan koordinasi terkait pembangunan dan peningkatan infrastruktur di daerah terpencil kabupaten Aceh Utara pada tanggal 7 s.d 9 Juli 2022.
- Melakukan Peninjauan pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 s.d 17 Juli 2022.
- Melakukan peninjauan terhadap pembangunan infrastruktur dan situs bersejarah di Kab. Aceh Jaya pada tanggal 22 s.d 23 Juli 2022.
- Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta terkait penguatan Undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) dilanjutkan Melakukan pertemuan dengan Badan Pangan Nasional dan Kementerian Koperasi dan UKM terkait penguatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada tanggal 24 s.d 29 Juli 2022.
- Melakukan pertemuan dengan para Ulama dan Tokoh Masyarakat Aceh terkait penguatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Kab.Aceh Barat dan Kab.Aceh Jaya pada tanggal 4 s.d 8 Agustus 2022
- Melakukan pertemuan dengan para Ulama dan Tokoh Masyarakat Aceh terkait penguatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Kab.Aceh Utara pada tanggal 30 Juli s.d 1 Agustus 2022.
- Melakukan Rapat Pembahasan dengan Tim Advokasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) di Lhokseumawe pada tanggal 17 s.d 20 Agustus 2022.
- Melakukan pertemuan dengan para Ulama dan Tokoh Masyarakat Aceh terkait penguatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Jakarta pada tanggal 17 s.d 20 Agustus 2022.
- Melakukan koordinasi terkait RAPBA Tahun 2023 ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta pada tanggal 22 s.d 29 Desember 2022.
- Melakukan Pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait Penguatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Aceh Timur pada tanggal 3 s.d 9 September 2022.

- Melakukan Pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait Penguatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Kab.Bireuen pada tanggal 6 s.d 9 September 2022.\
- Melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Sekjen MPR RI dan Ketua Badan Legislasi DPR RI terkait Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Jakarta pada tanggal 26 s.d 29 September 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara ,guna memperoleh masukan dan sebagai bahan perbandingan dala penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 s.d 29 September 2022.
- Melakukan peninjauan fasilitas Pendidikan dan koordinasi terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen pada tanggal 30 September s.d 3 Oktober 2022.-
- Melakukan peninjauan terkait kerusakan pada beberapa fasilitas publik dan rumah masyarakat akibat bencana alam di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 4 s.d 6 Oktober 2022.-
- Melakukan peninjauan infrastruktur di Kabupaten Aceh Tengah sekaligus menghadiri kegiatan forum Geuchik di Kecamatan Kuta Makmur di Kab.Aceh Tengah pada tanggal 27 s.d 30 Oktober 2022.
- Melakukan diskusi ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait rencana revisi Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Melakukan peninjauan penanganan dampak bencana banjir Kab.Aceh Utara pada tanggal 5 s.d 7 November 2022.
- Menghadiri undangan dan mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegrasi (PAKU Integritas) Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 1 s.d 4 November 2022.-
- Menghadiri acara Open Grasstrack Championship 2022 Piala Ketua DPR Aceh di Sirkuit NP Loys Jaya Group Jalan Elak Gp. Alue Lim, Blang Mangat - Lhokseumawe dan menghadiri Peresmian Komplek Putri Dayah MDA di Kota Lhokseumawe dan Pidie Jaya pada tanggal 15 s.d 17 November 2022.-

- Menghadiri Peresmian Pabrik Kelapa PT.Satya Agung dan Penyerahan Sertifikat Plasma oleh Bapak Hadi Tjahjanto - Menteri ART/BPN RI di Kab.Aceh Utara pada tanggal 21 s.d 25 Oktober 2022
- Melakukan Realisasi Fisik dan peninjauan pembangunan Infrastruktur di FAKab. Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Bireuen pada tanggal 21 s.d 25 Oktober 2022.-
- Menghadiri acara penutupan kegiatan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan, penutupan kegiatan pemagangan dalam negeri dalam daerah dan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Disnakermobduk Aceh dan Aceh Oil Institute di Kab. Aceh Utara pada tanggal 24 s.d 28 November 2022.-
- Melakukan peninjauan Abrasi Pantai Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon di Kab.Aceh Utara pada tanggal 6 s.d 9 Desember 2022.
- Menghadiri undangan Musyawarah Daerah (Musda) XIV DPD KNPI Aceh di Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 10 s.d 12 Desember 2022.
- Menghadiri Undangan pembukaan PORA XIV di Kab. Pidie pada tanggal 10 s.d 12 Desember 2022.

3) H. Dalimi, SE, Ak

- Melakukan peninjauan lapangan pasca banjir di Kab. Aceh Timur pada tanggal 13 s.d 16 Januari 2022
- Melakukan koordinasi dengan kantor penghubung pemerintah Aceh di Jakarta terkait pelayanan Pimpinan dan Anggota DPR Aceh di Jakarta pada tanggal 3 s.d 5 Februari 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Solo terkait pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19 dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan tokoh masyarakat Aceh di Jakarta terkait Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Bagi Hasil Migas Aceh pada tanggal 16 s.d 21 Februari 2022.
- Melakukan peninjauan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadhan ke Kab. Pidie pada tanggal 13 s.d 16 April 2022.
- Melakukan Advokasi ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait Penguatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Jakarta pada tanggal 3 s.d 6 Juli 2022.

- Melakukan peninjauan Terminal Tipe B Pidie dan Sarana Keselamatan Jalan Raya Ruas Jalan provinsi Aceh Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Teupin Raya pada tanggal 9 s.d 12 Agustus 2022.
- Melakukan Advokasi ke Kementerian Dalam Negeri R.I terkait Penguatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Jakarta pada tanggal 19 s.d 21 Agustus 2022.-
- Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat kabupaten Pidie guna menyerap masukan terkait Penguatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada tanggal 29 Agustus s.d 1 September 22.
- Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda Aceh di Kota Bandung guna menyerap masukan terkait Penguatan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada tanggal 29 s.d 28 September 2022.
- Melakukan peninjauan Jalan Provinsi Ruas Batas Aceh besar-Laweung-Tibang dan peninjauan Pelayanan di Kantor UPTD Wilayah III Pidie.
- Menghadiri Undangan Pembukaan Pekan Olahraga Aceh XIV Pidie 2022 pada tanggal 9 s.d 12 Desember 2022.-
- Melakukan peninjauan banjir di Padang Tijie Kabupaten Pidie pada tanggal 16 s.d 19 Desember 2022.-

4) Hendra Budian, SH

- Melakukan kunjungan kerja ke PT.Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah pada tanggal 9 s.d 11 Januari 2022.
- Melakukan koordinasi ke DPR RI terkait Pembangunan Dry Port,tataran transportasi lokal dan penyediaan sarana transportasi beberapa wilayah di Aceh serta pertemuan dengan tokoh Aceh di Kantor Penghubung Aceh serta melakukan koordinasi lanjutan ke Komisi X DPR RI terkait dengan pengembangan potensi destinasi wisata halal Aceh di Jakarta pada tanggal 12 s.d 19 Januari 2022.
- Melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara serta pertemuan dengan tokoh-tokoh Aceh dan perwakilan mahasiswa Aceh terkait

dengan pengembangan potensi destinasi wisata halal Aceh pada tanggal 3 s.d 7 Januari 2022.-

- Menghadiri undangan dari PT. Bank Aceh Syariah di Jakarta pada tanggal 31 Januari s.d 3 Februari 2022.-
- Melakukan kunjungan kerja ke DPRK Bener Meriah terkait pembangunan Dry Port pada tanggal 10 s.d 13 Februari 2022.
- Melakukan peninjauan terkait operasional Terminal Tipe B dan Terminal angkut barang serta vaksinasi masal Covid-19 Kab.Bener Meriah pada tanggal 16 s.d 18 Februari 2022.
- Melakukan konsultasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Aceh di Jakarta pada tanggal 27 s.d 30 Maret 2022.-
- Melakukan kunjungan kerja dalam rangka audiensi dengan Wakil Ketua I DPR RI sekaligus melakukan pertemuan dengan tokoh Aceh di Jakarta pada tanggal 25 s.d 28 Mei 2022.-
- Melakukan Koordinasi dengan Komisi X DPR RI terkait dengan pengembangan agrowisata berbasis Syariah di Aceh di Jakarta pada tanggal 29 Mei s.d 5 Juni 2022.-
- Menghadiri undangan pembukaan MTQ ke XXXV tingkat Provinsi Aceh Tahun 2022 Kab. Bener Meriah pada tanggal 17 s.d 20 Juni 2022.-
- Melakukan koordinasi ke DPR RI terkait dengan usulan pembangunan Dry Port dan tataran Transportasi Lokal di Wilayah Kabupaten Bener Meriah di Jakarta pada tanggal 6 s.d 8 Juli 2022
- Melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Dalam Negeri Republik Indonesia terkait tugas-tugas Badan Legislasi DPRA.-
- Melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri R.I terkait dengan Advokasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta pada tanggal 28 s.d 31 Juli 2022.-
- Melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait dengan Advokasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Jakarta pada tanggal 16 s.d 19 Agustus 2022.-

- Melakukan konsultasi ke DPR RI terkait dengan Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh di Jakarta pada tanggal 1 s.d September 2022.-
- Melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Sekjen MPR RI dan Ketua Badan Legislasi DPR RI terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Jakarta pada tanggal 6 s.d 9 September 2022.-
- Melakukan konsultasi ke DPR RI terkait Advokasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di Jakarta pada tanggal 18 s.d 21 September 2022.-
- Melakukan konsultasi ke DPR RI terkait dengan Advokasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta pada tanggal 27 s.d 30 September 2022.
- Melakukan konsultasi ke DPR R.I terkait dengan Advokasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta pada tanggal 25 s.d 27 Oktober 2022.-
- Melakukan kunjungan kerja ke DPR RI terkait pembangunan Dryport di Provinsi Aceh di Jakarta pada tanggal 25 s.d 27 Oktober 2022.-
- Melakukan kunjungan ke Badan Penghubung Pemerintah Aceh terkait inventarisasi dan kondisi aset kendaraan bermotor milik Pemerintah Aceh di Jakarta pada tanggal 30 Oktober s.d 1 November 2022.-
- Menghadiri undangan dan mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 2 s.d 4 November 2022.-
- Menghadiri Undangan penutupan Festival Didong 2022 di Kab.Bener Meriah pada tanggal 5 s.d 11 November 2022.
- Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab.Bener Meriah terkait pembangunan Dryport pada tanggal 4 s.7 Desember 2022.

5) Safaruddin, S.Sos, M.S.P

- Melakukan Advokasi/revisi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke DPR RI di Jakarta 2 s.d 3 Februari 2022.
- Melakukan peninjauan dan menyerahkan bantuan kepada korban musibah kebakaran rumah di Gampong Ladang Neubok, Kecamatan jeumpa serta meninjau pembangunan infrastruktur Dayah Istiqamatuddinti qamatuddin

Ulil Albab Al-Assyie Gapong Lamkuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 8 s.d 11 Februari 2022.-

- Menghadiri undangan acara penutupan kejuaraan Bulutangkis Beregu PBSI Aceh Tamiang di GOR Tamiang Sport Center karang Baru ke Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 20 s.d 22 Februari 2022
- Melakukan konsultasi ke DPR RI terkait penanganan banjir yang melanda beberapa Kabupaten/Kota di Aceh dan Penanganan sengketa lahan di Kab.Aceh Barat Daya di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 Januari 2022
- Melakukan Koordinasi ke DPR RI terkait Advokasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Jakarta pada tanggal 1 s.d 5 Maret 2022
- Melakukan peninjauan serta menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada korban musibah kebakaran rumah dan toko di Gampong Ujong Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 23 s.d 25 Maret 2022.-
- Melakukan konsultasi ke DPR RI terkait dengan rencana pembagian lahan untuk mantan kombatan GAM di Aceh di Jakarta pada tanggal 6 s.d 9 April 2022.-
- Melakukan koordinasi terkait strategi peningkatan Mutu Pendidikan di Universitas Sumatera Utara (USU).-
- Menghadiri undangan BPJS Kesehatan dalam rangka mengikuti rapat koordinasi keberlangsungan kerjasama Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan melanjutkan menghadiri undangan PBSI Provinsi Banten terkait rapat koordinasi dukungan Pemerintah Aceh terhadap pengembangan Cabor dan Pembinaan Atlit Bulutangkis Aceh di Jakarta pada tanggal 13 s.d 17 April 2022.-
- Menghadiri undangan HUT Kab. Aceh Barat Daya dan mengantar bantuan tanggap darurat untuk korban Angin Badai di Gampong Tengah Kecamatan Susoh Kab. Aceh Barat Daya pada tanggal 9 s.d 11 Mei 2022.-
- Melakukan koordinasi terkait dengan penguatan peran Alumni Universitas Sumatera Utara (USU) terhadap pembangunan berbagai sektor di Provinsi Aceh.-

- Melakukan Koordinasi terkait penolakan terhadap penetapan empat pulau di Wilayah Aceh masuk ke dalam Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 ke Sumatera Utara pada tanggal 9 s.d 12 Juni 2022.-
- Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri R.I terkait pengusulan Penjabat Gubernur Aceh dan pertemuan dengan tokoh-tokoh Aceh terkait Penjabat Gubernur Aceh ke Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta pada tanggal 19 s.d 23 Juni 2022.
- Melakukan koordinasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) serta pertemuan dengan tokoh masyarakat Aceh di Badan Penghubung Pemerintah Aceh Jakarta terkait Advokasi UUPA di Jakarta pada tanggal 1 s.d 4 Juli 2022.-
- Melakukan peninjauan lokasi pembangunan rumah duaafa di Kab.Aceh Barat Daya pada tanggal 28 s.d 31 Juli 2022.
- Menghadiri undangan penutupan kegiatan Bhakti Sosial Tagana di Lapangan Apel Kantor Bupati Aceh Barat Daya dan melakukan peninjauan rencana kegiatan normalisasi irigasi di Gampong Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.-
- Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait LHP BPK RI TA 2021 Ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait Penguatan dan Pendalaman materi Revisi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
- Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat kota subulussalam terkait penguatan dan pendalaman materi revisi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
- Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Kab.aceh Barat terkait penguatan dan pendalaman materi revisi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
- Melakukan konsultasi ke DPR RI terkait penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPR Aceh Tahun 2023.
- Melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, guna memperoleh masukan dan sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan

dan pembahasan Rencana Kerja tahunan DPR Aceh Tahun 2023 pada tanggal 26 s.d 29 September 2022.

- Menghadiri Undangan terkait Musyawarah Nasional (MUNAS) II IKA USU Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 21 s.d 24 Oktober 2022.
- Menghadiri undangan dan mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Pemerintah Daerah Tahun 2022 pada tanggal 1 s.d 4 November 2022.
- Melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI terkait kebutuhan alsintan kelompok tani masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Menghadiri Undangan Pembukaan Kejuaraan Daerah Bulutangkis Zonasi Timur Utara Aceh Tahun 2022 di Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 17 s.d 18 November 2022
- Menghadiri undangan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Aceh Tahun 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya dan menghadiri undangan penutupan Turnamen Bola Kaki BARSELA CUP II 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 26 s.d 29 November 2022.
- Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terkait penguatan dan pendalaman materi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada tanggal 16 s.d 18 September 2022.
- Menghadiri Undangan Pembukaan Kejuaraan BARSELA Cup Tahun 2022 dan Undangan Pembukaan Turnamen Bulutangkis Piala BARSELA Cup I Tahun 2022 ke Kab.Aceh Barat Daya pada tanggal 11 s.d 14 November 2022.
- Menghadiri Undangan sidang Terbuka Senat akademik Universitas Pakuan dalam rangka Pengukuhan Dr.Sufmi Dasco ahmad,SH.MH Sebagai Prof. Bidang Ilmu Hukum di Jakarta pada tanggal 30 November s.d 3 Desember 2022.
- Melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk penguatan penambahan dan Otsus Aceh serta melakukan koordinasi dengan PT.Graha Putra Raya terkait rencana investasi di Aceh di Jakarta pada tanggal 19 s.d 23 November 2022.
- Melakukan silaturahmi dengan Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh di Jakarta dilanjutkan Melakukan koordinasi dengan pengurus Pusat

Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP.PBSI) terkait Pengembangan Cabang Olahraga dan Pembinaan Atlit Bulutangkis Aceh di Jakarta pada tanggal 9 s.d 13 Desember 2022.

- Menghadiri Undangan Aceh Expo Produk Ekraf Aceh Tahun 2022 di Sumatera Utara pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2022 .
- Menghadiri undangan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PBSI Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 14 s.d 17 Desember 2022 di Jakarta pada tanggal 14 s.d 17 Desember 2022.-

3.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut:

1. Adanya Nomenklatur Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dapat lebih maksimal mengakomodir kegiatan DPRA;
2. Terlaksananya SOTK baru Sekretariat DPRA yang lebih mengakomodir fungsi-fungsi DPRA (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018);
3. Komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta operasional dan administrasi Sekretariat DPRA; dan
4. Kerjasama dan Komunikasi serta Koordinasi Intensif antara stakeholder baik internal (Bagian/Sub. Bagian) maupun eksternal (mitra sukses).

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut:

“Fungsi Sekretariat DPRA hanya sebagai unsur pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRA, sehingga pencapaian kinerja sangat tergantung pada kinerja DPRA”

3.3 Realisasi Anggaran

Aspek keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai salah satu pendukung dan media pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan. Operasionalisasi setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRA memperoleh alokasi anggaran murni sebesar **Rp. 231.945.600.000,-** namun terjadi pengurangan anggaran sebesar **Rp. 6.132.667.429,-** dari sisa Gaji dan tunjangan ASN, gaji dan tunjangan DPRA serta sisa dari beberapa kegiatan, sehingga anggaran perubahan menjadi **Rp. 225.812.932.571,-**. Secara umum, alokasi anggaran tersebut sudah terealisasi dengan baik yaitu sebesar **Rp. 203.919.157.367,-** (90,30%) dengan sisa anggaran **Rp. 21.893.775.204,-** (9,7%).

Dari total pagu anggaran Tahun 2022, alokasi anggaran untuk mendukung kinerja DPRA adalah sebesar **Rp. 168.008.395.480,-** (74,4%), sedangkan untuk mendukung operasional Sekretariat DPRA adalah **Rp. 57.804.537.091,-** (24,6%).

Adapun rincian anggaran yang tersedia dan terealisasi untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRA Tahun 2022 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	Realisasi		
			ANGGARAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	6	6
	SEKRETARIAT DPRD	225,812,932,571.00	203,919,157,367.00	90.30	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119,977,411,013.00	115,598,670,247.00	96.35	96.35
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	736,643,952.00	588,427,696.00	79.88	79.88

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370,792,222.00	317,187,400.00	85.54	85.54
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	330,163,386.00	243,636,146.00	73.79	73.79
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,688,344.00	27,604,150.00	77.35	77.35
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30,111,866,710.00	28,934,899,218.00	96.09	96.09
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,020,280,696.00	17,463,167,781.00	96.91	96.91
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11,784,990,000.00	11,208,626,379.00	95.11	95.11
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230,745,000.00	212,857,108.00	92.25	92.25
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4,280,300.00	3,290,300.00	76.87	76.87
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,125,000.00	7,883,400.00	48.89	48.89
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	55,445,714.00	39,074,250.00	70.47	70.47
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	660,496,460.00	557,059,694.00	84.34	84.34
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	660,496,460.00	557,059,694.00	84.34	84.34
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	789,381,609.00	578,248,276.00	73.25	73.25
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111,618,800.00	108,585,240.00	97.28	97.28
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	341,858,000.00	291,374,076.00	85.23	85.23
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	335,814,809.00	178,288,960.00	53.09	53.09
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90,000.00	-	-	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,209,033,366.00	2,934,382,633.00	91.44	91.44
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,795,218,910.00	1,620,314,330.00	90.26	90.26
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	216,910,634.00	144,129,300.00	66.45	66.45
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	359,755,000.00	358,004,000.00	99.51	100.00

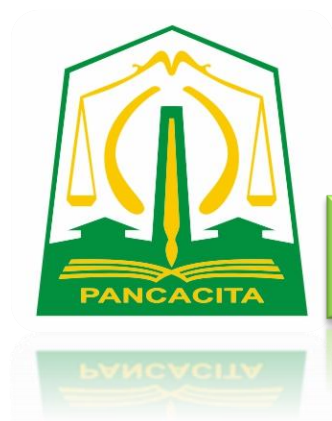
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	837,148,822.00	811,935,003.00	96.99	96.99
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,366,320,062.00	2,273,073,900.00	96.06	96.06
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,366,320,062.00	2,273,073,900.00	96.06	96.06
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,093,852,241.00	6,474,222,560.00	91.27	91.27
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,347,874,921.00	4,001,310,277.00	92.03	92.03
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359,150,000.00	332,054,103.00	92.46	92.46
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,386,827,320.00	2,140,858,180.00	89.69	89.69
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,985,054,781.00	10,583,029,366.00	96.34	96.34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	349,340,000.00	347,010,550.00	99.33	99.33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,591,197,342.00	2,544,675,954.00	98.20	98.20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,044,517,439.00	7,691,342,862.00	95.61	95.61
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	51,811,944,110.00	50,831,596,787.00	98.11	98.11
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	49,960,056,200.00	49,201,875,837.00	98.48	98.48
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1,387,521,150.00	1,351,696,950.00	97.42	97.42
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	464,366,760.00	278,024,000.00	59.87	59.87
10	Layanan Administrasi DPRD	12,212,817,722.00	11,843,730,117.00	96.98	96.98
	Fasilitasi Fraksi DPRD	87,999,960.00	44,210,000.00	50.24	50.24

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12,124,817,762.00	11,799,520,117.00	97.32	97.32
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	105,835,521,558.00	88,320,487,120.00	83.45	83.45
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	30,795,117,481.00	16,589,413,708.00	53.87	53.87
	Pembahasan Rancangan Perda	30,145,117,481.00	16,039,413,708.00	53.21	53.21
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	650,000,000.00	550,000,000.00	84.62	84.62
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,195,126,720.00	1,121,327,909.00	93.83	93.83
	Pembahasan KUA dan PPAS	80,137,840.00	79,657,840.00	99.40	99.40
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	75,132,490.00	44,047,830.00	58.63	58.63
	Pembahasan APBD	891,040,490.00	868,744,279.00	97.50	97.50
	Pembahasan Perubahan APBD	43,842,490.00	23,904,550.00	54.52	54.52
	Pembahasan Laporan Semester	8,467,850.00	8,467,850.00	100.00	100.00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	96,505,560.00	96,505,560.00	100.00	100.00
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8,591,660,583.00	7,940,067,865.00	92.42	92.42
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	633,248,000.00	616,117,471.00	97.29	97.29
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	718,372,000.00	714,656,576.00	99.48	99.48
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	902,044,000.00	898,942,190.00	99.66	99.66
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	667,984,000.00	665,466,194.00	99.62	99.62
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	669,884,000.00	648,964,960.00	96.88	96.88
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2,987,470,640.00	2,404,903,274.00	80.50	80.50
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1,549,518,000.00	1,527,877,257.00	98.60	98.60
	Pembahasan Laporan Keterangan	463,139,943.00	463,139,943.00	100.00	100.00

	Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	13,663,123,202.00	12,056,700,191.00	88.24	88.24
	Bimbingan Teknis DPRD	2,904,529,000.00	2,425,186,035.00	83.50	83.50
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4,937,000,000.00	4,877,913,890.00	98.80	98.80
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2,016,000,000.00	1,580,000,000.00	78.37	78.37
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	432,000,000.00	400,000,000.00	92.59	92.59
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1,638,243,400.00	1,526,364,700.00	93.17	369.85
	Penyusunan Program Kerja DPRD	1,735,350,802.00	1,247,235,566.00	71.87	71.87
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	40,390,382,767.00	39,982,203,756.00	98.99	98.99
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12,322,544,000.00	12,104,303,481.00	98.23	98.23
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	56,854,026.00	51,167,505.00	90.00	90.00
	Pelaksanaan Reses	28,010,984,741.00	27,826,732,770.00	99.34	99.34
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	729,378,140.00	686,781,620.00	94.16	94.16
	Pengawasan Kode Etik DPRD	729,378,140.00	686,781,620.00	94.16	94.16
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	242,199,965.00	211,386,940.00	87.28	87.28
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	242,199,965.00	211,386,940.00	87.28	87.28
8	Fasilitasi Tugas DPRD	10,228,532,700.00	9,732,605,131.00	95.15	95.15
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5,368,500,000.00	5,293,945,955.00	98.61	98.61
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	121,225,000.00	96,039,443.00	79.22	79.22
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1,739,216,700.00	1,624,518,700.00	93.41	93.41
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,999,591,000.00	2,718,101,033.00	90.62	90.62

Sisa realisasi anggaran ini bersumber dari beberapa sub kegiatan, dengan rincian kegiatannya sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan/sosialisasi rancangan qanun yang tidak terlaksana dikarenakan belum adanya regulasi/aturan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Penyediaan tenaga ahli tidak terlaksana dengan maksimal, dikarenakan tidak semua Alat Kelengkapan Dewan merekrut 3 orang tenaga ahli sekaligus dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Kunjungan kerja luar negeri tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan masih adanya Pandemi Covid-19 yang melanda di beberapa negara, dan Kementerian Dalam Negeri RI serta Kementerian Sekretariat Negara tidak mengeluarkan izin untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri.
4. Adanya beberapa Anggota DPRA yang melakukan Bimbingan teknis hanya sebanyak 1-2 kali saja, sedangkan yang direncanakan adalah sebanyak 3 kali untuk Anggota DPRA.
5. Dan beberapa sisa anggaran dari kegiatan rutin lainnya.



**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2022**

**BAB IV
PENUTUP**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRA. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya telah dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRA untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022 terdapat beberapa indikator kinerja tidak sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRA Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai dalam tahun ini, sehingga seluruh target Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang diperjanjikan dapat terealisasi **sangat baik** dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Dalam penyusunan dokumen laporan kinerja tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya kendala/hambatan sehingga perlunya langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRA, untuk maksud tersebut maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja sehingga dapat menentukan indikator-indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur dan benar-benar

- diperlukan dan dapat dicapai dalam mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap DPRA, serta dapat menentukan target-target kinerja yang lebih akurat, sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan pengukuran;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja;
 3. Adanya koordinasi dan kerjasama antar Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat DPRA dalam penyediaan data untuk penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengingat bahwa kinerja organisasi pada prinsipnya didukung oleh akurasi dan validasi data kinerja yang memadai.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRA Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu sumber informasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRA dan menjadi acuan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 31 Januari 2023

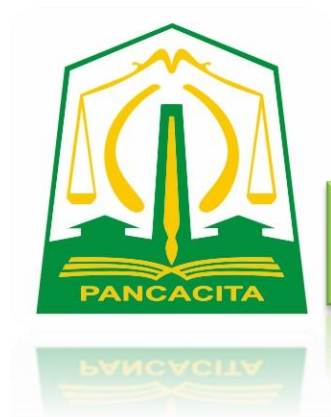
 **Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh** 



SUHAIMI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640622 199403 1 001



**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2022**

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHAIMI, SH, MH**
Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**
Jabatan : **GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, 

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Banda Aceh, 2022

Pihak Pertama,


SUHAIMI, SH, MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

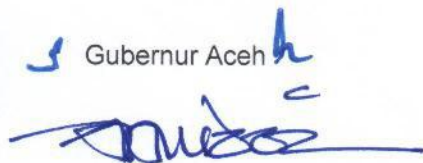
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Persentase Qanun yang diselesaikan	100%
2.	Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase kegiatan DPRA yang terfasilitasi	100%

Program

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Anggaran

Rp. 99.660.775.199


Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Banda Aceh, Januari 2022
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh


SUHAIMI, SH, MH



PPID Sekretariat DPRA

Admin Integrasi Data